

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 1985-2005**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Bustanul Arifin

Nomor Mahasiswa : 03313095

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2007

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 1985-2005**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Ekonomi Indonesia

Oleh:

Nama : Bustanul Arifin

Nomor Mahasiswa : 03313095

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2007

PENGESAHAN

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 1985-2005**



Nama : Bustanul Arifin
Nomor Mahasiswa : 03 313 095
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 2 Agustus 2007

Telah disetujui dan disahkan oleh

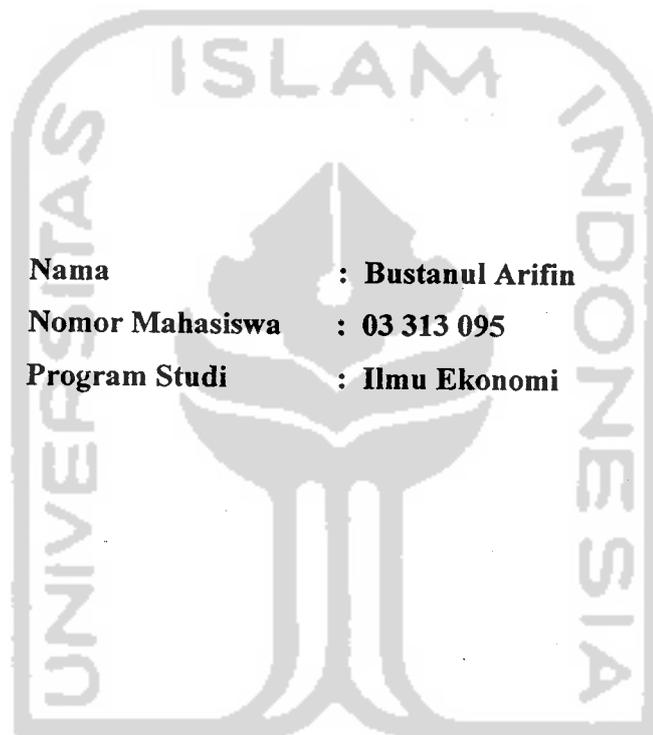
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Dr. Jaka Sriyana', written over a horizontal line.

Dr. Jaka Sriyana

PENGESAHAN

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 1985-2005**



Nama : Bustanul Arifin
Nomor Mahasiswa : 03 313 095
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 2 Agustus 2007

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaka Sriyana', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Dr. Jaka Sriyana

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan tulus ikhlas Kupersembahkan Karya kecil untuk:

ALLAH SWT

Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat,
karunia, petunjuk, kekuatan dan ilmu pengetahuan serta hidayah-Nya

NABI MUHAMMAD S.A.W

Sebagai tauladan dan kunci menuju kecerahan keselamatan
dunia akherat

BAPAK H. SOEPARNO IBU Hj. LISTARI TERCINTA

Tak akan kata yang cukup yang sanggup untuk mengutarakan
rasa terima kasih hanya doa tulus yang sanggup
kupersembahkan

KEPONAKANKU TERSAYANG

Kasih sayang, bantuan, dorongan dan doanya yang membuat aku
bisa terhibur dalam hidupku

SESEORANG DI HATIKU

Terima kasih telah mendampigiku di saat susah senang, tetap
mendampigiku saat tertawa dan berduka, karena kamu aku bisa

SAHABAT- SAHABATKU

Sahabat adalah saudara yang diciptakan oleh hati, perasaan,
dan kebersamaan. Sahabat selalu berusaha menjadi yang
terbaik untuk sahabat lainnya. Memberi corak kehidupan dalam
perjalanan waktu

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 29 Juli 2007

Penulis,

Bustanul Arifin

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri Di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1985-2005**

**Disusun Oleh: BUSTANUL ARIFIN
Nomor mahasiswa: 03313095**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 7 September 2007

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Jaka Sriyana, M.Si, Ph.D

Penguji I : Drs. Suharto, M.Si

Penguji II : Drs. Priyonggo Suseno, M.Sc

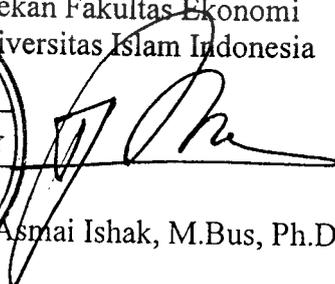


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D



MOTTO

*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
(Al-Mujadilah : 11)*

*Pelajarilah ilmu, sebab mencari ilmu karena Allah adalah kebaikan, mempelajarinya adalah tasbih, mengkajinya adalah jihad mengajarkannya adalah sedekah dan membelanjakan hartanya kepada ahlinya adalah kedekatan
(Mu'adz bin jabal)*

*Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses, tapi sukses itu sendiri sesungguhnya baru merupakan jalan tak berketentuan menuju puncak sukses
(Lambert Jeffries)*

*Sungguh manusia Berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal sholeh serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku
(Q.S Al - Ashr : 2-3)*

Masa depan yang cerah selalu tergantung pada masa lalu yang dilupakan. Kita tidak dapat meneruskan hidup dengan baik jika tidak dapat melupakan kegagalan dan sakit hati di masa lalu.

"Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan keikhilasan membuat kita tidak akan merasa terbebani"

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas kekuatan yang diberikan Allah padaku untuk bisa berjuang menyelesaikan amanah dan segala kewajibanku sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPEGARUHI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 1985-2005** Skripsi ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun yang telah dan akan penulis terima. Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Jaka Sriyana, Dr. SE, M.Si.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, waktu, tenaga, arahan, dan motivasi dengan segala ketelitian dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Coy, Pit - X, Oento Waluyo, Yono Penthol, dan semua arek-arek X-SMUSA Bojonegoro kalian motivasiku selama aku di rumah. Ayo kita dukung PERSIBO di Devisi Utama musim depan. BOROMANIA damai bersaudara.....

8. Perempuanaku Dwi Retno Puri, Makasih atas dukungan, semangat dan perhatian yang telah kamu berikan kepadaku, susah senang kita selalu bersama. Karena kamu aku bisa banyak berubah...
9. Semua pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberi masukan-masukan dan bantuan guna penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT, Amien. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata penulis berharap, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah wawasan penulis sendiri serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 29 Juli 2007

Penulis,

Bustanul Arifin

2. Bapak Suharto,, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Ibu Dosen, beserta seluruh Staf Akademik yang telah memberikan masukan berupa ide, kritik, saran, dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Soeparno dan Ibu Hj. Listari yang telah memberikan segenap rasa cinta, kasih sayang dan do'a untuk senantiasa membimbing penulis ke arah jalan yang diridhoi Allah SWT, serta memberikan dorongan, perhatian, kritik dan dukungan baik bersifat moril maupun materiil sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia dan semua Keluarga besar ku tercinta yang ada di Bojonegoro, makasih atas dukugan,semagat dan doanya.
5. Teman-Teman IE'03, Amen, Bagus, Huda, Asep, Amar, Duro Mansyur, Adi Brebes, Narto, Iroel, Najib, Yandi, Rochman, Danang, Minggu, Andy Tile, Rifqi, Wisnu, Nophal, Pandu, Juned, Teguh, Nanta,Ucup.SE, Fauzi, Andy Kenthung, Ari, Eka, Afin, Brian, Shifa, Alex Petruk, Citra, Adi yusri, Reza Tejo, Ria, Nelly, Hana, Dewi. SE, Henty, Nely Rahma, Wening, Nitha, Fitri, Metha.SE, Sari.SE semua seperjuangan IE 2003. Ayo jangan berhenti disini, lanjutkan langkah kita ke arah yang lebih baik lagi. Salam damai bersaudara. Hidup ARCATEL...!!
6. Teman – Teman IE'02 Donny, Ade, Kepet, Margo, Yayak black, Ipank, Ansor, Yudha, Eko santos, Dwi BG, Ipuy, Eko Tentrem, Pakdhe Wibi, Ichsan, Awenk, Murshal, Om Didin, Agoenk (XL), Giri, Hatta, Emon, Ca2k ku'00 Itonk,Dodi, Mbah Ye, Big, Bongki makasih atas dukungan dan motivasinya yang telah di berikan kepada ku.
7. Arek-arek Bojonegoro Agoeng'k Mbalen, Adi Darmaji, Farid Njemblunk, Yono Ulo, Khotax, Barie, Riez Pink, Uut Friends, Cempe, Benny, Mas

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman Daftar Isi.....	x
Halaman Daftar Tabel.....	xiii
Halaman Daftar Gambar.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
Halaman Abstraksi.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Hipotesis Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II GAMBARAN UMUM DAN SUBYEK PENELITIAN.....	12
2.1. Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	12
2.1.1. Letak Geografis, Wilayah Administrasi, dan Luas	
Wilayah	12
2.1.2. Iklim	14
2.1.3. Keadaan Penduduk	15
2.1.4. Keadaan Tenaga Kerja	16
2.2. Tinjauan Perekonomian Propinsi D I Yogyakarta	17
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	17
2.2.2. Perkembangan Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta ..	20
2.2.3. Keuangan Daerah	22
BAB III KAJIAN PUSTAKA.....	28
BAB IV LANDASAN TEORI.....	32
4.1. Investasi	32
4.2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	34
4.3. Produk Domestik Bruto	35
4.4. Teori Tingkat Suku Bunga	38
4.4.1. Suku Bunga Dalam Negeri	39
4.4.2. Kredit	41
4.4.3. Tujuan Kredit	42
4.4.4. Fungsi Kredit	42
4.4.5. Jenis-jenis Kredit	44
4.4.5.1 Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai	44

6.1.1. Pemilihan Model Regresi	72
6.1.2. Hasil Regresi	73
6.1.3. Koefisien determinasi (R^2).....	74
6.1.4. Pengujian t-Statistik	75
6.1.5. Pengujian F-Statistik	80
6.2. Pengujian Asumsi Klasik	81
6.2.1. Autokorelasi	81
6.2.2. Multikolinearitas	83
6.2.3. Heterokedastisitas	84
6.3. Interpretasi Hasil Regresi	85
6.3.1. Produk Domestik Bruto (PDRB)	86
6.3.2. Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI) Bank Umum	86
6.3.3. Inflasi (INF)	87
6.3.4. Dummy Variabel masa sebelum dan sesudah krisis moneter (DM)	88
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	90
7.1. Kesimpulan	90
7.2. Implikasi.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 1995-2005 atas dasar harga konstan tahun 2000	3
1.2 Nilai PMDN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1994- 2005	5
2.1 Luas Kabupaten / Kotamadya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..	13
2.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D. I Yogyakarta	14
2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Propinsi D.I Yogyakarta Tahun 2005.....	16
2.4 PDRB Kabupaten/Kota Propinsi D.I Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	19
2.5 Realisasi APBD Propinsi D.I Yogyakarta 2005	23
2.6 Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2005	24
2.7 Realisasi Belanja Daerah Propinsi D.I. Yogyakarta 2005	26
5.2 Uji Statistik Durbin – Watson	69
6.1 Hasil Uji MWD	72
6.2 Uji R-square	73
6.3 Hasil Regresi Log-Linear	74
6.4 Hasil Uji t-Statistik	76
6.5 Hasil Uji LM	82
6.6 Hasil Pengujian Multikolinearitas	83
6.7 Hasil Uji White test	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
5.1. Daerah Autokorelasi.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- I. Data Perkembangan PMDN, PDRB, SBKI, Inflasi, dan Variabel Dummy masa sebelum dan sesudah krisis moneter di propinsi DI Yogyakarta
- II. Uji MWD
- III. Uji Regresi Linear dan Log Linear
- IV. Uji Multikolinearitas 1, dan Uji Multikolinearitas 2
- V. Uji Multikolinearitas 3, dan Uji Multikolinearitas 4
- VI. Uji White



Abstraksi

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1985-2005”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI) Bank Umum, Inflasi (INF), dan Dummy Variabel masa sebelum dan sesudah krisis moneter (DM) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) propinsi DI Yogyakarta Periode tahun 1985 – 2005. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi loglinier berganda, dengan data time series tahunan Periode 1985 – 2005 yang bersumber dari Biro Pusat Statistik Indonesia dan Bank Indonesia. Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan R-square (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) propinsi DI Yogyakarta pada $\alpha = 5\%$. Variabel Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI) Bank Umum, Inflasi (INF), dan Dummy Variabel masa sebelum dan sesudah krisis moneter (DM) tidak berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) propinsi DI Yogyakarta. Uji F diperoleh F-hitung 158,2033 sedangkan F-tabel = 3,01 ($\alpha = 0,05 ; 3,01$), sehingga F-hitung > F-tabel ($158,2033 > 3,01$) sehingga secara bersama-sama variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI) Bank Umum, Inflasi (INF), dan Dummy Variabel masa sebelum dan sesudah krisis moneter (DM) berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) propinsi DI Yogyakarta. Untuk pengujian terhadap uji asumsi klasik tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sehingga diharapkan kepada peneliti lain yang sejenis untuk melengkapi baik dengan menambah variabel atau data-data yang digunakan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mekanisme penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi suatu negara. Begitu halnya dengan investasi yang juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investasi asing.

Penerimaan investasi dalam negeri maupun investasi asing merupakan salah satu pos penerimaan negara yang memberikan kontribusi cukup potensial dalam hal pembiayaan anggaran dan belanja negara. Laju pertumbuhan perekonomian yang didasarkan pada alur investasi positif menggambarkan gerak pacu positif dengan dukungan beberapa faktor penunjang lainnya. Pertumbuhan ekonomi dan hubungannya dengan keberlanjutan pembangunan diketahui bahwa peningkatan output sektor-sektor ekonomi riil dapat dibentuk melalui mekanisme penambahan kapasitas produksi.

Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah peran serta investasi mempunyai cakupan yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya sebagai penyokong pembangunan dan pertumbuhan nasional melalui pos penerimaan negara sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Alur Investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian yang berasal dari dalam negeri. Harrod Domar menyatakan, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan adanya semakin banyak tabungan yang kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi secara riil, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap tabungan dan investasi tergantung dari tingkat produktivitas investasi tersebut (Todaro M., 1993 : 65-66).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Jelas dengan demikian bahwa investasi khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan (Samuelson dan Nordhaus, 1993 : 183).

Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui GNP (Gross National Product) dapat juga dijadikan indikator atas laju perekonomian nasional yang dalam hal ini menyangkut efektifitas dari tingkat investasi alam maupun luar negeri. Selama dekade 10 tahun terakhir (periode 1995 – 2005) terlihat perubahan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan terbesar tercatat pada tahun 1995 dengan nilai GDP sebesar Rp. 1.340.379,2 Milliar dengan laju pertumbuhan sebesar 8,22 % dari tahun sebelumnya. Angka laju tersebut ternyata mengalami penurunan hingga pada klimaks penurunan minimum pada tahun 1998 hingga mencapai kondisi (minus) sebesar -13,12 % dengan nilai nominal Rp. 1.314.474,3 Milliar. Kondisi ini adalah kondisi krisis ekonomi yang berpengaruh terhadap hampir semua sektor ekonomi tak terkecuali pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
periode 1995-2005 atas dasar harga konstan tahun 2000

Tahun	GDP tahun dasar 2000 (Milliar rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
1995	1.340.379,2	8,22
1996	1.445.172,6	7,82
1997	1.513.093,9	4,69
1998	1.314.474,3	-13,12
1999	1.324.873,4	0,79
2000	1.389.769,6	4,89
2001	1.442.984,6	3,83
2002	1.506.124,4	4,37
2003	1.579.559,0	4,87
2004	1.660.578,8	5,12
2005	1.749.546,9	5,35

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia, berbagai edisi. (data diolah)

Masa pasca krisis ekonomi terdapat gejala perbaikan saat periode tahun 1999 dengan sedikit kenaikan yang mencapai laju pertumbuhan 0,79 % dengan nilai pertumbuhan nasional sebesar Rp. 1.324,873,4 Milliar dan terus mencapai kenaikan hingga periode tahun 2005 dengan nilai nominal Rp. 1.749.546,9 Milliar

dengan mencatat angka laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 % dari tahun 2004.

Dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat marak lesunya iklim investasi di Indonesia, karena dengan melihat sisi pertumbuhan nasional terlihat semakin besar atau kecilnya output total dari suatu negara yang mencerminkan produktifitas nasional yang dalam bahasan ini dikaitkan dengan dana investasi dalam maksimalisasi total produksi yang mendorong pada tingkat laju pertumbuhan nasional.

Apabila hal diatas dikaitkan dengan kondisi yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinilai terdapat cakupan yang sangat strategis dan berpotensi untuk mencapai target pertumbuhan investasi dimana guna memenuhi kebutuhan dana tersebut peran sektor swasta sangat besar, lebih kurang 75% dari dana yang ada dan sisanya disediakan oleh pemerintah. Hampir 50% dari investasi swasta ditanamkan pada sektor industri, sebab berdasarkan dari data yang ada sektor industri merupakan alternatif pertama dengan asumsi mampu mendatangkan keuntungan yang relatif besar.

Begitu halnya dengan faktor inflasi. Inflasi mampu mempengaruhi pada daya beli masyarakat akan suatu potensi pasar. Apabila dilihat dari sisi profitabilitas bagi investor, inflasi memperlihatkan bahwa dengan adanya inflasi akan semakin menurunkan nilai uang yang beredar, dengan begitu kegiatan investasi akan terpengaruh dengan dampak yang secara tidak langsung mengurangi jumlah keuntungan yang mampu di dapat melalui kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing oleh pihak-pihak penanam modal.

Berdasarkan perhitungan nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode 1994-1997, di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 1994 mencapai Rp 659.889,22 juta yang yang tercatat mengalami laju peningkatan sebesar 9,73 % dari tahun sebelumnya. Sementara untuk tahun 1995 penanaman modal dalam negeri mengalami kenaikan sebesar Rp 905.692,6 juta dengan tingkat kenaikan sebesar 31,97 %. Hingga pada periode tahun 1996 jumlah dari nilai PMDN tercatat sebesar Rp. 1.064.588 juta yang memiliki prosentase peningkatan sebesar 17,54 %.

Tabel 1.2
Nilai PMDN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 1994-2005

Periode	Nilai PMDN (juta Rp.)	Laju (%)
1994	686.307,3	9,73
1995	905.692,6	31,97
1996	1.064.588,0	17,54
1997	1.283.716,0	20,58
1998	1.299.966,0	1,27
1999	1.362.201,0	4,79
2000	1.815.183,0	33,25
2001	1.814.240,0	-0,05
2002	1.961.916,0	8,14
2003	2.405.275,0	22,60
2004	2.401.967,0	-0,14
2005	2.251.067,0	-6,28

Sumber : Bappenas Propinsi DIY, diolah.

Memasuki masa krisis, dan pasca krisis ekonomi, jumlah penanaman modal di propinsi DIY secara berkala menunjukkan beberapa kenaikan yang cukup fluktuatif. Diawali dengan nilai PMDN awal pada saat masa krisis tahun 1997, sebesar Rp. 1.283.716 juta dengan mencatat laju peningkatan sebesar 20,58

% dari tahun 1996. Bisa dikatakan angka prosentase kenaikan yang cukup stabil dengan melihat kondisi perekonomian nasional pada masa itu.

Pada tahun 1998, nampaknya terlihat pengaruh dari situasi krisis yang mencatat minimnya laju peningkatan yang hanya berkisar di angka 1,27 %, dengan total nilai PMDN sebesar Rp. 1.299.966 juta. Tingkat laju pertumbuhan di tahun berikutnya ternyata mulai menunjukkan laju perbaikan yang mampu meningkatkan nilainya sebesar Rp. 1.815.183 juta dengan laju peningkatan sebesar 33,25 % pada tahun 2000.

Laju PMDN tertinggi selama masa pasca krisis kurun waktu 1998 – 2005, tercatat pada tahun 2000 dengan laju pertumbuhan sebesar 33,25 %, dan terendah tercatat pada tahun 2005 dengan laju penurunan hingga mencapai -6,28 %, dengan nilai PMDN sebesar Rp. 2.251.067 juta.

Berdasarkan latar belakang berbagai perkembangan indikator perekonomian yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah utama dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1985-2005”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dilakukan penelitian :

1. Seberapa besar pengaruh variabel produk domestik regional bruto, suku bunga kredit investasi dalam negeri, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap investasi PMDN di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Seberapa besar pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap penanaman modal dalam negeri di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Seberapa besar pengaruh variabel tingkat suku bunga terhadap penanaman modal dalam negeri di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Seberapa besar pengaruh variabel inflasi terhadap penanaman modal dalam negeri di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Seberapa besar pengaruh perbedaan antara krisis dan sebelum krisis nilai investasi yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu luas dan dapat memberikan pengertian yang jelas maka perlu diberikan batasan masalah yaitu ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan modal dalam negeri di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebagai berikut :

1. Data pertumbuhan ekonomi yang dipergunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, kurun waktu 1985 - 2005.
2. Data perhitungan inflasi yang dipergunakan adalah data Inflasi propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahunan, kurun waktu 1985 - 2005.
3. Data tingkat suku bunga kredit investasi yang dipergunakan adalah data *time series* tahunan tingkat suku bunga kredit investasi rata-rata tertimbang bank umum di propinsi DI Yogyakarta periode 1985 – 2005.

4. Data masa krisis dan sebelum krisis yang dipergunakan sebagai bahan acuan adalah periode 1985 – 1996 dinyatakan sebagai masa sebelum krisis moneter, dan periode 1997 – 2005 adalah masa setelah krisis moneter.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa seberapa besar pengaruh produk domestik regional bruto terhadap penanaman modal di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisa seberapa besar pengaruh tingkat inflasi terhadap penanaman modal di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menganalisa seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga kredit investasi bank umum terhadap penanaman modal di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Menganalisa apakah ada perbedaan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri antara masa setelah krisis dan sebelum krisis ekonomi.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi pemerintah daerah dan pihak pemerintah daerah
Diharapkan menjadi tambahan informasi sekaligus bahan evaluasi agar lebih memantapkan peran perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi kebijakan investasi dalam negeri di tahun-tahun mendatang

2. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan penerapan dari teori-teori akademis yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi, sekaligus sebagai tolak ukur pribadi tentang keilmuan yang diterima selama ini, dan juga sebagai tugas akhir yang merupakan syarat dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Islam Indonesia.

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Produk domestik regional bruto, suku bunga kredit investasi dalam negeri, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap investasi PMDN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Produk domestik regional bruto, berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap investasi PMDN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Suku bunga dalam negeri, berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap investasi PMDN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta, berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap investasi PMDN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Krisis ekonomi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap investasi PMDN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.7.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN SUBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek penelitian. Yang berisi tentang kondisi geografis, penduduk, ketenagakerjaan, dan tinjauan perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama tentang investasi pertumbuhan dan pembangunan daerah penanaman modal dalam negeri, serta inflasi.

BAB V METODE PENELITIAN

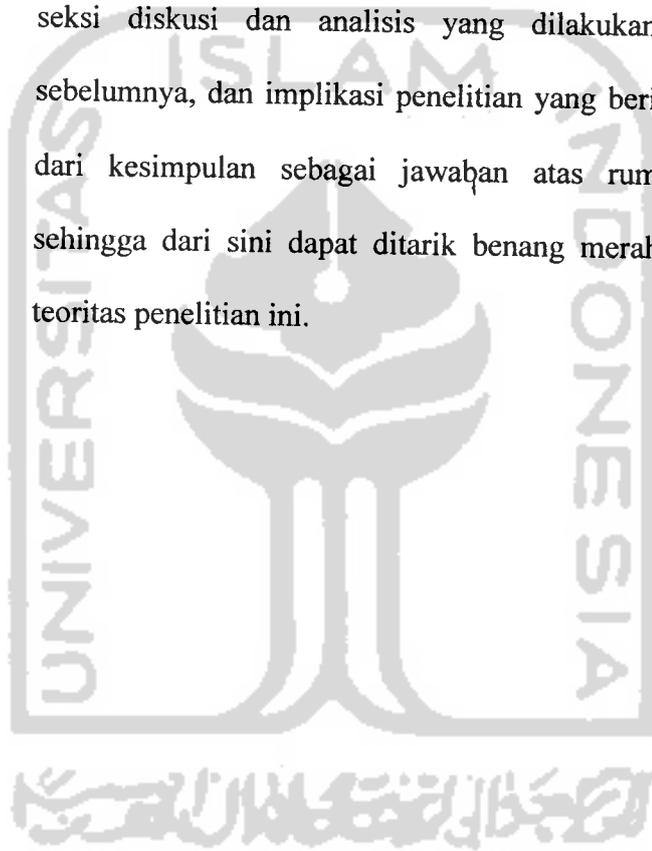
Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik.

BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAN SUBYEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

2.1.1 Letak Geografis, Wilayah Administrasi, Dan Luas Wilayah

Karakteristik Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu propinsi dari 30 propinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah di bagian selatan di batasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh propinsi Jawa Tengah yang meliputi, di sebelah Timur Laut Kabupaten Klaten, di sebelah Tenggara Kabupaten Wonogiri, di sebelah Barat Kabupaten Purworejo, dan di sebelah Barat Laut Kabupaten Magelang

Berdasarkan karakter fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

- Pegunungan Selatan,
 - luas : $\pm 1.656,25 \text{ km}^2$
 - ketinggian : 150-700 m
- Gunung Berapi Merapi,
 - luas : $\pm 582,81 \text{ km}^2$
 - ketinggian : 80-2.911 m
- Dataran Rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo,
 - luas : $\pm 215,62 \text{ km}^2$
 - ketinggian : 0-80 m
- Pegunungan Kulonprogo dan Dataran Rendah Selatan,
 - luas : $\pm 706,25 \text{ km}^2$
 - ketinggian : 0-572 m

Berdasar garis lintang dan garis bujur, Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 7°.33 - 8°.12 Lintang Selatan dan 110°.00 - 110°.50 Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.890.754 km²), merupakan propinsi terkecil setelah Propinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari :

Tabel 2.1
Luas Kabupaten / Kotamadya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1.	Kabupaten Bantul	506,85	15,91
2.	Kabupaten Kulonprogo	586,27	18,40
3.	Kabupaten Gunung Kidul	1.485,36	46,63
4.	Kabupaten Sleman	574,82	18,04
5.	Kotamadya Yogyakarta	32,50	1,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 km² luas D.I. Yogyakarta, 35,93 persen merupakan jenis tanah Lithosol, 27,41 persen Regosol, 11,93 persen Lathosol, 10,45 persen Grumusol, 10,30 persen Mediteran, 2,24 persen Alluvial, dan 1,74 persen adalah tanah jenis Rensina.

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 – 499 meter dari permukaan laut tercatat sebesar 65.65 persen, ketinggian kurang dari 100m sebesar 28,84 persen, ketinggian antara 500m – 999m sebesar 5,04 persen dan ketinggian di atas 1000m sebesar 0,47 persen.

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah menurut
Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (km ²)
Kulonprogo	12	88	586,27
Bantul	17	75	506,85
Gunungkidul	18	144	1.485,36
Sleman	17	86	574,82
Yogyakarta	14	45	32,50
Propinsi DIY	78	438	3.185,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta

2.1.2 Iklim

Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 6 mm – 949 mm yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut catatan Stasiun Meteorologi Bandara Adisucipto, suhu udara rata-rata di Yogyakarta tahun 2005 menunjukkan angka 27,64° C lebih panas dibandingkan rata-rata suhu udara tahun 2004 yang tercatat sebesar 26,2° C, dengan suhu maksimum 36,60° C dan suhu minimum 22,00° C, sedangkan kelembaban udara tercatat 37 – 39 persen, tekanan udara antara 1.007,30 mb – 1.016,1 mb, dengan arah angin antara 210- 270 derajat dan kecepatan angin antara 01 sampai dengan 15 knot.

2.1.3 Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2005, jumlah penduduk D.I. Yogyakarta tercatat 3.281.800 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk perempuan 50,78 persen dan penduduk laki-laki 49,22 persen.

Pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 adalah 1,88 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kota Yogyakarta terlihat memiliki angka pertumbuhan di atas angka provinsi, yakni 5,5 persen

Dengan luas wilayah 3.185,80 km², kepadatan penduduk D.I. Yogyakarta 1.030 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di kota Yogyakarta yakni 12.939 jiwa per km² dengan luas wilayah hanya 1 persen dari luas Propinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki luas wilayah mencapai 46,63 persen dihuni rata-rata 468 jiwa per km².

Komposisi kelompok umur penduduk D.I. Yogyakarta didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar 10,53 persen dan kelompok umur lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 13,65 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya harapan hidup penduduk DIY.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2005

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Laki-laki	%	Jumlah Perempuan	%	Total Penduduk
1	Kulonprogo	192,988	49.91	193,698.0	50.09	386,686.0
2	Bantul	401,172	48.70	422,562.0	51.30	823,734.0
3	Gunungkidul	340,862	48.99	354,886.0	51.01	695,748.0
4	Sleman	482,810	50.55	472,314.0	49.45	955,124.0
5	Yogyakarta	197,505	46.97	223,003.0	53.03	420,508.0
	Propinsi DIY	1,615,337	49.22	1,666,463.0	50.78	3,281,800.0

Sumber : Susenas, BPS Propinsi DI Yogyakarta 2005

2.1.4 Keadaan Tenaga Kerja

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Propinsi DIY pada tahun 2005 didukung oleh 87.344 orang pegawai negeri sipil. Ditinjau menurut level pemerintahan, pemerintahan yang tersebar pada 5 kabupaten/ kota di DIY. Menurut golongan dari total PNS di DIY, 1,55 persen menduduki golongan I, golongan II 22,24 persen, 53,69 persen menduduki golongan III dan selebihnya golongan IV sebesar 22,51 persen.

Gambaran tenaga kerja di sektor swasta berdasarkan data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mencatat jumlah pencari kerja pada tahun 2005 sebanyak 168.339 orang, meningkat sekitar 26,29 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 133.347 orang. Mereka terdiri dari 52,18 persen laki-laki dan 47,82 persen perempuan. Dari jumlah tersebut 48,81 persen berpendidikan SLTA, 13,18 persen Diploma, 33,17 Sarjana Muda dan Sarjana, serta 4,15 persen adalah SLTP dan

sisanya 0,70 persen berpendidikan SD. Persentase lowongan pekerjaan yang tersedia dan penempatan masing-masing adalah 10,12 persen dan 9,60 persen dari total pencari kerja.

Berdasarkan hasil Susenas 2005, persentase penduduk DIY umur 15 tahun ke atas menurut kegiatan adalah 71,95 persen merupakan angkatan kerja (68,31 persen bekerja dan 3,63 persen mencari pekerjaan), sedangkan sisanya sebesar 28,05 persen merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya masing-masing adalah 12,45 persen, 11,06 persen, dan 4,55 persen). Sedangkan berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian 36,09 persen, perdagangan 24,26 persen, jasa 14,04 persen, industri 13,67 persen dan sisanya 11,94 persen di sektor-sektor lainnya.

2.2 Tinjauan Perekonomian Propinsi D.I. Yogyakarta

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi makroekonomi di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2005 memperlihatkan perkembangan yang cukup mantap, meskipun pada paruh kedua terjadi gejolak yang dialami oleh perekonomian Indonesia baik yang bersifat eksternal maupun internal. Terjadinya gejolak yang dialami oleh perekonomian Indonesia baik yang bersifat eksternal maupun internal. Terjadinya gejolak eksternal dipicu oleh melambungnya harga minyak dunia, yang selanjutnya diikuti oleh penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah Pusat sebanyak dua kali selama tahun 2005. Kebijakan ini serta merta mengakibatkan lonjakan inflasi baik secara nasional maupun regional termasuk Kota Yogyakarta. Peningkatan harga minyak dunia, di sisi lain, sempat menciptakan gejolak di pasar valas dalam negeri sebagai akibat naiknya permintaan dollar terutama untuk

memenuhi kebutuhan impor minyak oleh Pertamina. Pada tahun 2005 Rupiah mengalami tekanan depresi yang cukup kuat sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan April, Juli dan Agustus dan secara rata-rata selama tahun 2005 nilai tukar Rupiah terdepresiasi sebesar 8,5 %.

Dalam mengatasi gejolak tersebut diatas yakni berupa lonjakan inflasi dan tingkat depresiasi yang berlebihan, salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia adalah dengan melakukan pengetatan moneter melalui peningkatan suku bunga *BI Rate* yang cukup signifikan hingga mencapai 12,75 % di akhir tahun 2005, atau terjadi kenaikan sebesar 5,35 % selama tahun 2005. Selanjutnya, sebagai respon kebijakan Bank Indonesia tersebut perbankan meningkatkan suku bunganya termasuk suku bunga kredit, yang pada gilirannya juga menjadi salah satu faktor yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi 2005 Indonesia pada umumnya dan DI Yogyakarta pada khususnya.

Di tengah kondisi makroekonomi nasional yang kurang kondusif, pada tahun 2005, perekonomian DI Yogyakarta masih mampu tumbuh 4,64 %, meskipun lebih lambat dari laju pertumbuhan tahun 2003 dan 2004 yang masing-masing tercatat 4,58 % dan 5,13 % serta lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,6 % pada tahun 2005. Dengan menggunakan harga konstan tahun 2000, nilai Produk Domestik Regional Bruto (DIY) tercatat Rp. 16.899 miliar pada tahun 2005, lebih tinggi dari nilai PDRB tahun lalu yang tercatat 16.150 miliar.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi DI Yogyakarta didorong oleh kenaikan kinerja sektor perdagangan, hotel & restoran, sedangkan dari sisi permintaan, ekonomi DI Yogyakarta tumbuh karena besarnya peran investasi yang diduga berasal dari kegiatan investasi pada bisnis properti, yang cukup marak dalam beberapa tahun terakhir di wilayah DI Yogyakarta.

Dari sisi kewilayahan, perkembangan ekonomi di wilayah propinsi DI Yogyakarta terjadi di seluruh Kabupaten/Kota. Laju pertumbuhan PDRB tercepat dialami oleh Kabupaten Sleman yang tercatat 5,08 % pada tahun laporan, agak melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,25 %. Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan masing-masing dengan laju sebesar 4,99 % dan 4,89 %, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul dengan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing 3,51 % dan 3,12 %.

Tabel 2.4
PDRB Kabupaten/Kota Propinsi DI Yogyakarta
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

milliar Rp.

No.	Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003	2004		2005	
						Nilai	Ptumb (%)	Nilai	Ptumb (%)
1	Bantul	2,585	2,681	2,801	2,932	3,080	5,04	3,234	4,99
2	Gunungkidul	2,290	2,367	2,444	2,527	2,613	3,43	2,695	3,12
3	Kulonprogo	1,190	1,234	1,285	1,339	1,399	4,52	1,448	3,51
4	Sleman	3,985	4,171	4,374	4,593	4,837	5,25	5,083	5,08
5	Yogyakarta	3,510	3,649	3,812	3,994	4,195	5,05	4,401	4,89

Sumber : BPS Propinsi DIY (data olahan)

Berdasarkan sumbangannya terhadap PRRB DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman merupakan kontributor terbesar dalam pertumbuhan perekonomian DI Yogyakarta dengan prosentase kontribusi (30 %) diikuti Kota Yogyakarta (26 %), Kabupaten Bantul (19 %), Kabupaten Gunungkidul (16 %), dan kabupaten Kulonprogo (9%).

2.2.2 Perkembangan Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara makro variabel investasi merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya-upaya untuk meningkatkan penghasilan nasional. Sebab, investasi ini merupakan kegiatan produktif yang pada gilirannya akan mampu memacu mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi. Secara umum kenaikan investasi melalui *multiplier effect* akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, jika hal ini dipandang secara mikro, maka investasi ini akan merupakan daya dorong bagi perusahaan untuk meningkatkan aktivitasnya. Aktivitas ini bisa berupa peningkatan produksi atau perluasan kapasitas produksi. Muara dari semua itu adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa yang bisa diproduksi. Dengan kata lain, melalui investasi ini maka jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh perusahaan akan bertambah banyak dan pada gilirannya, akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Disatu sisi, peningkatan jumlah barang dan jasa akan menggembirakan konsumen. Hal ini terjadi dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa maka tingkat konsumsi mereka akan meningkat. Artinya pilihan barang dan jasa yang akan dikonsumsi bertambah menjadi luas. Jika hal ini disertai dengan meningkatnya daya beli maka jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi akan bertambah besar. Dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Jika tingkat kesejahteraan ini obsesi pembuat keputusan maka menjadi semakin jelas disini variabel investasi harus memperoleh perhatian yang lebih khusus untuk diamati.

Sisi lain yang perlu diperhitungkan dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa adalah sisi produsen. Dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi ada dua dimensi yang perlu diperhitungkan. Pertama adalah dimensi penyerapan tenaga kerja. Peningkatan produksi ini diharapkan diikuti oleh

peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian problem pengangguran yang selama ini menghantui pemerintah bisa teratasi. Kedua, dengan meningkatnya produksi maka investasi masyarakat diharapkan menjadi bertambah besar yang pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan masyarakat disekitarnya.

Dari sini bisa diketahui bahwa perencanaan investasi adalah bagian yang tak tertinggal dari upaya peningkatan pendapatan nasional. Perencanaan investasi mempunyai peranan yang sangat strategis. Merencanakan sebuah investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian suatu negara, prediksi keuntungan diwaktu yang akan datang, luas pasar dan jangkauan pemasaran serta kondisi sosial politik yang sedang berlangsung. Faktor terakhir ini menyangkut keamanan dana yang akan ditanam. Sebab jika kondisi sosial politiknya labil para investor akan menjadi enggan untuk menanamkan modalnya. Hal ini disebabkan oleh tiadanya jaminan keamanan atas dana investasi yang ditanamkan.

Yogyakarta adalah kota pelajar, kota budaya dan kota pariwisata selama Pelita VI menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pertahun. Target pertumbuhan ekonomi sebesar ini diperkirakan memerlukan dan investasi sebesar Rp 6,18 trilyun. Dari dana sebesar Rp 6,18 trilyun tersebut ternyata sebagian besar diperkirakan datang dari swasta (74,4%). Sementara itu pemerintah diminta untuk menyediakan dana investasi sebesar (25,6%). Investasi swasta adalah investasi berskala besar. Investasi swasta ini baik dengan fasilitas PMDN/PMA maupun non PMDN/PMA mempunyai sikap yang sangat spekulatif. Dana yang ditanamkan yang sebagian berasal dari pihak ketiga sebenarnya memerlukan sikap yang sangat hati-hati. Namun karena unsur spekulasinya yang lebih dominan, maka para investor ini kadang-kadang perhitungannya menjadi kurang matang.

Investasi PMA/PMDN ini sebagian besar (40%) disektor industri. Sektor ini menjadi pilihan utama mereka, karena sektor ini yang dipandang mampu memberikan keuntungan yang paling besar. Disamping itu produk-produk sektor industri ini relatif tahan lama, harganya relatif tinggi dan pasarnya relatif luas menyebabkan para investor terobsesi untuk melakukan investasi disektor ini. Sebab alasannya untuk melakukan investasi, keuntungan yang maksimal adalah obsesi mereka.

2.2.3 Keuangan Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di wilayah Propinsi DIY sampai pada tahun 2005, tercatat dalam perkembangan kinerja keuangan pemerintah secara umum cukup baik. Di sisi penerimaan, Pemerintah Daerah mampu merealisasikan pendapatan lebih dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar 104,34 % atau Rp. 2.771 miliar jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2005 sebesar Rp. 2.598 miliar. Sementara itu di sisi pengeluaran/ belanja daerah, realisasi sampai dengan akhir tahun 2005 mencapai Rp. 2.638 miliar atau 90,45 % jika dibandingkan anggaran belanja tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp. 2.917 miliar. Dengan demikian, pada tahun 2005 terjadi *surplus* anggaran sebesar Rp. 73 miliar, meskipun sebelumnya diperkirakan defisit sebesar Rp. 319 miliar.

Tabel 2.5
Realisasi APDB
Propinsi DI Yogyakarta 2005

Juta Rp

No	Uraian	APBD 2005	Realisasi APBD	
			Nominal	Persentase thd APBD
A	Pendapatan	2,598,072	2,710,809	104,34
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	609,539	652,631	104,07
2	Dana Perimbangan	1,858,309	1,926,116	103,65
3	Lain-lain	130,224	132,063	101,41
B	Belanja	2,916,697	2,638,114	90,45
1	Aparatur Daerah	1,069,208	973,918	91,09
2	Pelayanan Publik	1,472,250	1,362,870	92,57
3	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	323,814	294,041	90,81
4	Tidak Tersangka	51,424	7,285	14,17
C	Surplus/Defisit	(318,625)	72,695	-22,82
D	Pembiayaan	183,567	172,818	94,14
1	Penerimaan	431,526	400,947	92,91
2	Pengeluaran	112,900	285,006	252,44

Sumber :

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Propinsi DIY dan Bapeda Kabupaten/Kota.

Jika ditinjau berdasarkan aspek wilayah, pada tahun 2005 kinerja keuangan Pemerintah Daerah secara umum juga terlihat cukup baik. Realisasi penerimaan masing-masing wilayah mencapai di atas 100 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Persentase realisasi pendapatan tertinggi terdapat pada Kabupaten Sleman yang mampu merealisasikan pendapatannya sebesar 107,42 % yang diikuti oleh Kota Yogyakarta dan Propinsi DIY masing-masing sebesar 106,43 % dan 104,49 %.

Sementara itu, realisasi pengeluaran masing-masing wilayah berada di atas 80,00 % dari anggaran yang telah ditetapkan. Persentase realisasi belanja tertinggi terdapat pada Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul masing-masing

sebesar 94,58 % dan 94,08 %, sedangkan wilayah lainnya berhasil merealisasikan pengeluarannya di bawah 90,00 %.

Tabel 2.6
Realisasi Penerimaan Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2005

Juta Rp

No	Uraian	APBD 2005	Realisasi APBD	
			Nominal	Persentase thd APBD
	Pendapatan	2,598,072	2,710,809	104,34
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	609,539	652,631	104,07
	a. Sisa Anggaran Tahun Lalu	0	0	0
	b. Pajak Daerah	428,258	455,789	106,43
	c. Retribusi daerah	115,740	120,768	104,34
	d. Pendapatan Laba BUMD dan Investasi Lainnya	29,822	29,440	98,72
	e. Lain-lain	35,719	46,634	130,56
2	Dana Perimbangan	1,858,309	1,926,116	103,65
	a. Bagi Hasil Apjak dan Bukan Pajak	120,022	152,563	127,11
	b. Pendapatan Bagian Daerah dari PBB	11,781	16,022	136,00
	c. Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB	5,100	5,770	113,13
	d. Pajak Penghasilan Orang Pribadi	0	0	0,00
	e. PBB Pertambangan	0	0	0,00
	f. PBB Bagian dari Pemerintah Pusat	0	0	0,00
	g. Pendapatan Bagian Daerah dari SDA	345	323	93,56
	h. Dana Alokasi Umum	1,565,931	1,566,931	100,00
	i. Dana Alokasi Khusus	51,410	52,962	103,02
	j. Dana Perimbangan dari Propinsi	103,720	132,545	127,79
3	Pendapatan Lain-lain	130,224	132,063	101,41
	a. Bantuan Dana Kontigensi dari Propinsi	51,235	51,192	99,92
	b. Penerimaan Kelebihan Pembayaran PPh.21 Gaji PNS	2,884	3,452	119,67
	c. Dana Penyesuaian Ad Hoc	23,015	23,015	100,00
	d. Lain-lain	53,089	54,404	102,48

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Propinsi DIY dan Bapeda Kabupaten/Kota.

Realisasi pendapatan/ penerimaan Pemerintah Daerah di propinsi DI Yogyakarta pada tahun 2005 secara umum didominasi oleh Dana Perimbangan yang mencapai 71,05 % dari total pendapatan APBD DI Yogyakarta, diikuti oleh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Lain-lain dengan pangsa masing-masing sebesar 24,08 % dan 4,87 %.

Sampai dengan akhir tahun laporan, total realisasi pendapatan daerah dari seluruh Pemerintah Daerah di Propinsi DI Yogyakarta tercatat sebesar Rp. 2.711 miliar yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 653 miliar, Dana Perimbangan Rp. 1.926 miliar dan Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar Rp 132 miliar. Persentase realisasi terhadap APBD tahun 2005 tertinggi terdapat pada realisasi PAD yaitu sebesar 107,07 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 610 miliar. Sedangkan Pendapatan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain masing-masing terealisasi sebesar 103,65 % dan 101,41 % dari APBD sebesar Rp. 1.858 miliar dan Rp. 130 miliar.

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 465 miliar masih merupakan kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah dengan pangsa 69,84 %, berturut-turut diikuti oleh Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 121 miliar, Pendapatan Asli Daerah Lain-lain sebesar Rp. 47 miliar serta Pendapatan Bagian Laba BUMD dari investasi lainnya sebesar Rp. 29 miliar, dengan pangsa masing-masing sebesar 18,50 %, 71,15 % dan 4,51 %. Kabupaten tercatat memiliki persentase realisasi PAD tertinggi dibandingkan anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar 117,13 %, sedangkan persentase terendah terdapat pada Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 97,84 %.

Sedangkan tiga komponen utama penyumbang realisasi Pendapatan Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.566 miliar, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp. 152 miliar serta Dana Perimbangan dari Propinsi sebesar Rp. 133 miliar, dengan pangsa masing-masing sebesar 81,30 %, 7,92 % dan 6,88 %. Berdasarkan wilayah, persentase realisasi pendapatan Dana Perimbangan tertinggi terdapat pada Kota Yogyakarta yaitu sebesar 107,79 %,

sedangkan wilayah lainnya mampu merealisasikan Pendapatan Dana Perimbangan di atas 100,00 % dari anggaran yang ditetapkan.

Tabel 2.7
Realisasi Belanja Daerah
Propinsi DI Yogyakarta 2005

Juta Rp

No	Uraian	APBD 2005	Realisasi APBD	
			Nominal	Persentase thd APBD
	Belanja	2,916,697	2,638,114	90,45
1	Aparatur Daerah	1,069,208	973,918	91,09
	a. Pegawai/ Personalia	690,128	634,639	91,96
	b. Barang dan Jasa	106,875	92,321	86,38
	c. Perjalanan Dinas	25,871	20,033	77,43
	d. Pemeliharaan	69,758	61,462	88,11
	e. Administrasi Umum	55,622	52,321	94,06
	f. Subsidi/ Bantuan	38,335	37,097	96,77
	g. Pembayaran Bunga Pinjaman	158	134	84,73
	h. Modal	82,460	75,911	92,06
	i. Lain-lain	0	0	0,00
2	Pelayanan Publik	1,472,250	1,362,870	92,57
	a. Pegawai/ Personalia	801,788	753,907	94,03
	b. Barang dan Jasa	261,158	235,686	90,25
	c. Perjalanan Dinas	22,395	20,702	92,44
	d. Pemeliharaan	85,214	82,024	96,26
	e. Administrasi Umum	0	0	0,00
	f. Subsidi/ Bantuan	0	0	0,00
	g. Pembayaran Bunga Pinjaman	0	0	0,00
	h. Modal	301,695	270,551	89,68
	i. Lain-lain	0	0	0,00
3	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	323,814	294,041	90,81
4	Tidak Tersangka	51,424	7,285	14,17

Sumber :
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Propinsi DIY dan Bapeda Kabupaten/Kota.

Realisasi belanja/ pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi DI Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2005 secara umum didominasi oleh Pos Pelayanan Publik yang tercatat sebesar Rp. 1.363 miliar (51,66 %), yang kemudian diikuti oleh pos pos lainnya yaitu Pos Aparatur sebesar Rp. 974 miliar (36,92 %), Pos Bagi hasil dan

Bantuan Keuangan sebesar Rp. 294 miliar (11,55 %), serta Pos Tidak Tersangka sebesar Rp 7 miliar (0,28 %).

Sumber utama realisasi Belanja Pelayanan Publik terdapat pada Belanja Pegawai/ Personalia yang tercatat sebesar Rp. 754 miliar atau memiliki pangsa sebesar 55,32 %. Sedangkan belanja modal yang tercatat sebesar Rp. 271 miliar hanya memiliki pangsa 19,58 % dan sekaligus memiliki persentase terendah realisasi APBD yakni sebesar 89,68 %. Sedangkan komponen Belanja Pelayanan Publik lainnya telah terealisasi di atas 90,00 % dari anggaran yang ditetapkan. Ditinjau dari aspek wilayah, Kabupaten Gunungkidul memiliki persentase realisasi tertinggi sebesar 94,73 %, diikuti oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo masing-masing sebesar 93,05 % dan 92,89 %.

Belanja Aparatur DIY pada tahun 2005 didominasi oleh Pos yang sama dengan Belanja Pelayanan Publik, yaitu Belanja Pegawai/ personalia yang tercatat sebesar Rp.635 miliar atau 65,16 % dari Belanja Aparatur, yang disusul oleh Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang tercatat masing-masing sebesar Rp. 92 miliar dan Rp. 76 miliar atau memiliki pangsa 9,48 % dan 7,79 %. Kabupaten Gunungkidul tercatat memiliki persentase realisasi Belanja Aparatur tertinggi sebesar 95,52 %, sedangkan realisasi terendah terdapat pada Kabupaten Sleman yaitu sebesar 75,25 %.

Sedangkan Pos lainnya yaitu Bagi hasil dan Bantuan Keuangan mampu terealisasi sebesar 90,81 % dari anggaran yang telah ditetapkan dan Belanja tidak tersangka tercatat sebesar 14,17 %. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Bantul memiliki persentase realisasi tertinggi pada Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, yaitu sebesar 99,99 %, sekaligus pada Belanja Tidak Tersangka yaitu sebesar 92,27 %.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah :

Indra Arya W, melakukan penelitian tentang “Analisis Peranan Investasi PMDN dalam Perekonomian Indonesia”, dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil pengujian terhadap variabel independen secara individu (uji t) menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Hasil pengujian terhadap variabel independen secara individu (uji t) menunjukkan bahwa variabel Angkatan Kerja (AK) tidak signifikan terhadap PMDN di Indonesia, ini dikarenakan pertimbangan Investor domestik lebih pada faktor pertumbuhan ekonomi.
- Hasil pengujian terhadap variabel independen secara individu (uji t) menunjukkan bahwa Suku Bunga Kredit Investasi tidak signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa investor tidak memperhitungkan tingkat bunga dan lebih memperhitungkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.
- Koefisien determinasi majemuk (R^2) menghasilkan nilai yaitu sebesar 71%. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, variasi dari variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar

71% sedangkan sisanya sebesar 29% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

- Berdasarkan pengujian serempak dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen, artinya produk domestik bruto, suku bunga kredit investasi secara serempak mempunyai pengaruh terhadap penanaman modal dalam negeri di Indonesia.
- Tidak terdapat penyimpangan asumsi klasik yang meliputi Autokorelasi, Heteroskedastisitas dan Multikolinieritas.

Deni Nurdin Akbar, judul penelitiannya “Peranan Bantuan Luar Negeri, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap PDB Indonesia”. Hasil analisisnya :

- Variabel bantuan luar negeri signifikan dan mempunyai nilai koefisien positif, berarti sesuai dengan hipotesis. Besarnya kenaikan bantuan luar negeri akan peningkatan dalam PDB. Bantuan luar negeri yang diterima pemerintah telah dialokasikan pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi peningkatan output nasional.
- PMA selain meningkatkan kesempatan kerja juga membawa teknologi yang modern dan sistem pengelolaan perusahaan yang lebih profesional sehingga berdampak pada peningkatan produksi yang pada akhirnya output yang dihasilkan akan lebih besar.
- Pembentukan modal didalam negeri sudah cukup baik dan ini perlu terus ditingkatkan, supaya dapat melepaskan diri dari ketergantungan pembiayaan dari pihak asing terutama bantuan luar negeri.

Umi Kurniasih, dengan penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil analisa :

- Hasil pengujian terhadap variabel independen secara individu (uji t) menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya investasi.
- Hasil pengujian terhadap variabel independen secara individu (uji t) menunjukkan bahwa variabel Angkatan Kerja (AK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya investasi.
- Hasil pengujian terhadap variabel independen secara individu (uji t) menunjukkan bahwa variabel Dummy krisis moneter'98 berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap besarnya investasi.
- Hipotesis variabel suku bunga kredit/pinjaman berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap investasi tidak terbukti, hal ini dikarenakan fluktuasi nilai mata uang yang disesuaikan dengan kondisi suatu negara yang tidak stabil misalnya kondisi keamanan.
- Dengan mengadakan pengujian serempak dengan uji F statistik diperoleh hasil bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, hal ini berarti secara bersama-sama variabel PDRB, Angkatan Kerja, Tingkat Bunga dan variabel Dummy mempengaruhi investasi pada saat ini.
- R^2 sebesar 0,82 persen yang berarti variasi variabel PDRB, Angkatan Kerja, Tingkat Bunga dan variabel Dummy mampu menjelaskan variasi variabel investasi sebesar 82 persen sedangkan sisanya sebesar 18 persen ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar model.

- Tidak terdapat penyimpangan asumsi klasik yang meliputi Autokorelasi, Heteroskedastisitas dan Multikolinieritas.

M. Sofyan Setiawan, melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Antar Daerah-daerah di Indonesia pada Periode Tahun 1996”, dengan menggunakan pendapatan perkapita, jumlah panjang jalan di tiap propinsi, sebagai variabel-variabel pembantu untuk menganalisis penelitian tersebut. Dan hasil analisisnya adalah sebagai berikut :

- Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap investasi yang berarti semakin tinggi pendapatan perkapita maka investasi akan meningkat.
- Jumlah panjang jalan juga berpengaruh secara nyata positif terhadap investasi yang berarti pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan peningkatan investasi.
- Hasil uji serempak dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka ketimpangan investasi secara keseluruhan dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, jumlah panjang jalan, jumlah telepon dan jumlah penduduk.
- Pada uji asumsi klasik tidak terdapat Autokorelasi, Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas.

BAB IV LANDASAN TEORI

4.1. Investasi

Investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti; peralatan, gedung mesin atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi tersebut (Samuelson : 1994). Investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran oleh produsen untuk pembelian jasa jasa guna penambahan persediaan dan perluasan perusahaan (Budiono : 1986).

Adapun definisi secara agregat investasi adalah:

- a. Seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri.
- b. Pengeluaran-pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah dan tempat tinggal
- c. Pertambahan dalam nilai stok-stok barang perusahaan berupa barang mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi. Dari ketiga jenis investasi tersebut diatas yang paling penting adalah yang pertama (Sadono Sukirno, 1981)

Faktor penentu investasi sangat tergantung pada situasi di masa depan yang sulit untuk diramalkan, maka investasi merupakan komponen yang paling mudah berubah. Usaha untuk mencatat nilai penanaman modal dilakukan dalam satu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi, meliputi pengeluaran atau pembelanjaan untuk:

- a. Seluruh pembelian para pengusaha atas barang modal dan membelanjakan untuk mendirikan industri-industri.
- b. Pengeluaran masyarakat untuk mendirikan tempat tinggal.
- c. Pertambahan dalam nilai stok barang-barang perusahaan yang berupa bahan mentah, barang yang belum diproses dan barang jadi.

Adam Smith menyatakan bahwa investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. Pada waktu laju pemupukan modal meningkat, persaingan yang meningkat antar pemilik modal akan menaikkan upah dan sebaliknya menurunkan keuntungan.

Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Jelas dengan demikian bahwa investasi memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan (Samuelson dan Nordhaus, 1993 : 183).

Persediaan modal merupakan determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan

modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang.(Mankiw, 2003 : 178).

Pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan, dan barang-barang baru akan meningkatkan stok modal (*capital stock*) fisik suatu negara (yaitu jumlah nilai riil bersih dari semua barang-barang modal produktif secara fiskal) sehingga pada gilirannya akan memungkinkan negara tersebut untuk mencapai tingkat output yang lebih besar. Investasi jenis ini sering diklasifikasikan sebagai investasi di sektor produktif (*directly productive activities*). Investasi-investasi lainnya yang dikenal dengan sebutan infrastruktur sosial dan ekonomi (*social overhead capital*) yaitu jalan raya, listrik, air, sanitasi, dan komunikasi akan mempermudah dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi.(Arsyad, 1999 : 214)

4.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan pengeluaran yang disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan barang-barang modal. Barang atau stok modal tersebut terdiri dari pabrik, mesin dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan untuk proses produksi yang berasal dari investor dalam negeri. Jumlah pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang akan datang. Ada kalanya penanaman modal dalam negeri dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang telah lama aus dan perlu didepresiasi. Dalam prakteknya, Usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran atau perbelanjaan, antara lain :

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan lainnya.
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan Pendapatan Nasional.

Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan didapat investasi netto. Investasi netto bertujuan untuk memperbesar kemampuan perusahaan (dari perekonomian secara keseluruhan) untuk memproduksi barang (mempertinggi kapasitas produksi).

Tujuan investasi yang dilakukan para penanam modal berbeda dengan yang dilakukan oleh para konsumen (rumah tangga) yang membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, tetapi penanam modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi untuk mencari keuntungan. Dengan demikian banyaknya keuntungan yang akan diperoleh besar sekali peranannya dalam menentukan investasi yang dilakukan para pengusaha.

4.3 Produk Domestik Bruto

Angka total pendapatan atau Produk Nasional Bruto (*GNP-Gross National Products*) per kapita merupakan konsep yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat perekonomian penduduk di suatu negara. Konsep GNP itu sendiri merupakan indikator atas besar-kecilnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan. GNP adalah nilai moneter (dalam satuan mata uang) atas segenap

kegiatan ekonomi baik yang tinggal di luar negeri atau di dalam negeri, tanpa dikurangi depresiasi atas stok modal domestik.

Produk Domestik Bruto (*GDP- Gross Domestic Products*) adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian baik yang dilakukan oleh penduduk domestik maupun penduduk asing maupun orang-orang dari negara lain yang bermukim di negara yang bersangkutan. Jadi GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan milik penduduk domestik yang dikirim dari negara lain berkat kepemilikan mereka atas faktor produksi di luar negeri dikurangi pendapatan milik orang asing atas faktor produksi yang ada di negara domestik. (Todaro: 2000)

Produk domestik bruto merupakan ukuran terbaik dari kinerja perekonomian karena tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu (Mankiw; 1999). Terdapat beberapa cara untuk menilai PDB sebagai kinerja sebuah perekonomian, (1) dengan melihat PDB sebagai perekonomian total (pendekatan pendapatan) dari setiap orang yang berada di dalam perekonomian,(2) dengan melihat PDB sebagai pengeluaran total (pendekatan pengeluaran) pada output barang dan jasa perekonomian. Dari sudut pandang lain, jelaslah mengapa PDB merupakan cerminan dari kinerja ekonomi karena mengukur sesuatu yang dipedulikan banyak orang (pendapatan) demikian pula dengan output barang dan jasa yang memuaskan permintaan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. PDB mengukur pendapatan dan pengeluaran perekonomian pada outputnya dengan alasan bahwa jumlah keduanya adalah sama dan fakta yang mendasar : karena setiap transaksi memiliki penjual dan pembeli, setiap uang yang dikeluarkan seorang pembeli menjadi pendapatan seorang penjual yang lain.

Untuk mengukur pengaruh investasi luar negeri langsung Jepang di Indonesia dalam perekonomian adalah Produk Domestik Bruto Indonesia (*GDP-Gross Domestic Products*) karena aktivitas produksi (investasi langsung) Jepang berlokasi di Indonesia dan melibatkan unsur-unsur yang ada di dalam negeri. Meningkatnya perekonomian nasional mencerminkan kemampuan masyarakat untuk menyerap hasil produksi, selain itu, tingginya pendapatan suatu negara juga mencerminkan kemampuan dalam mengembalikan modal investasi dan menunjukkan keadaan pasar yang sedang berkembang. Hal yang demikian menarik minat investor untuk menginvestasikan modalnya (Kuncoro: 1997).

Studi empirik menunjukkan bahwa selama 1977-1983, dari 18 negara, negara-negara industri baru (MB) dan negara-negara Asia Tenggara tercatat berhasil menarik hampir 95 % dari arus investasi langsung (PMA), sementara negara-negara di Afrika Selatan dan Pasifik Selatan hanya memperoleh sisanya (Rana D. dalam Kuncoro: 1997). Faktor utama yang menarik investasi langsung tersebut ke MB dan Asia Tenggara adalah kinerja dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis seperti: tingginya pertumbuhan PDB dan pasar domestik yang relatif luas. Rendahnya aliran modal tersebut ke negara-negara Afrika Selatan dan Pasifik Selatan mencerminkan rendahnya kinerja ekonomi, lemahnya infrastruktur, sedikitnya sumber daya manusia dan tingginya *country risk*.

Misalkan pada awalnya investasi pada tingkat pendapatan nasional Y_0 adalah I_1 , dengan adanya kenaikan pendapatan ke Y_1 akan memperluas kegiatan ekonomi karena meningkatnya pendapatan akan menambah permintaan, pertumbuhan ekonomi akan mendorong perluasan investasi baru, sehingga dengan anggapan tingkat suku bunga yang stabil r %, maka akan ada investasi yang meningkat dari I_1 menjadi I_2 .

4.4 Teori Tingkat Suku Bunga

Menurut **Keynes**, tingkat bunga bukan merupakan titik pencerminan dari pasok (*supply*) tabungan disatu pihak dan permintaan untuk investasi dipihak lain. Tingkat bunga merupakan faktor yang lepas (*independent*) dari pasokan tabungan dan permintaan investasi. Tingkat tabungan adalah suatu fenomena moneter semata-mata dan tergantung dari hasrat orang untuk menahan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas dengan kata lain tingkat bunga tergantung dari (dipengaruhi) hasrat likuiditas (*liquidity preference*). Tingkat bunga adalah imbalan balas jasa penabung agar bersedia melepaskan bagian dari tabungannya yang disimpan untuk dicairkan ke dalam investasi. (Sumitro, 1991).

Tidak ada jaminan bahwa tabungan yang telah terkumpul dalam masyarakat akan tersalurkan semuanya untuk investasi. Masing-masing pihak dalam perilakunya akan terdorong oleh pertimbangan-pertimbangan yang berbeda. Dalam keadaan tingkat bunga rendah artinya penabung bersedia melepaskan tabungannya dengan harga murah, bisa saja terjadi kurangnya permintaan terhadap tabungan yang sudah tersedia dengan harga murah tersebut.

Dalam keadaan tertentu, mungkin sekali para investor kurang berminat untuk melakukan investasi walaupun tingkat bunga sudah menurun karena ekspektasi kurang cerah tentang perkembangan masa datang. Sebaliknya dalam keadaan tertentu, tinggi suku bunga yang ditawarkan, investor tetap bersedia membayar.

Tingkat bunga tidak pernah stabil; hari ini naik besok turun dan demikian seterusnya. Sejak awal Februari 1984, Bank Indonesia mulai memperkenalkan fasilitas diskonto dan melalui operasi pasar terbukanya mengeluarkan Sertifikat

Bank Indonesia (SBI) untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Dampak dari kebijakan tersebut, bank-bank umum pemerintah bebas menaikkan suku bunga deposito. Hal ini dimaksudkan agar dana masyarakat dapat digunakan untuk investasi sehingga terjadi kenaikan output. Langkah kebijakan ini mulai mengarah tercipta dan berfungsinya pasar uang lebih bebas. Perkembangan selanjutnya yaitu mulai dikenalkan pula Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai salah satu alat pengendali jumlah uang beredar.

Kebijakan devaluasi dimaksudkan untuk menaikkan daya saing ekspor di pasar luar negeri sehingga dapat bersaing dengan barang-barang impor. Namun demikian kebijakan devaluasi dapat menimbulkan tekanan inflasi. Hal ini disebabkan kenaikan harga barang bukan impor saja, tetapi akibatnya cenderung akan meluas pada kenaikan harga barang lain.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan bank-bank, telah dikeluarkan ketentuan baru seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Loan Deposit Ratio (LDR)*. Adanya kebijakan tersebut persepsi bank-bank atas perkreditan mulai berubah dan kelemahan dalam portofolio perkreditan mulai dirasakan, sehingga lebih berhati-hati dalam hal perkreditan. Kebijakan tersebut telah berhasil mengurangi ekspansi moneter meskipun dapat menyebabkan meningkatnya suku bunga deposito dan kredit bank, namun di sisi lain mampu menurunkan laju inflasi ke tingkat yang cukup rendah

4.4.1 Suku Bunga Dalam Negeri

Biaya modal (*cost of capital*) mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai investasi suatu perusahaan transnasional, sehingga untuk mendanai kegiatannya perusahaan transnasional menggunakan struktur modal yang dapat

meminimalkan biaya modal tersebut. Modal suatu perusahaan transnasional terdiri ekuitas yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan saham dan hutang yaitu dana yang diperoleh melalui pinjaman eksternal (Madura, 1999).

Biaya modal yang diperoleh dari penerbitan saham sulit diukur karena deviden yang diperoleh pemegang saham berhubungan dengan kinerja perusahaan. Ada pun biaya modal yang diperoleh melalui pinjaman eksternal lebih mudah diukur karena beban bunga yang ditanggung perusahaan berdasar angka waktu pinjaman.

Perusahaan transnasional cenderung akan menggunakan hutang eksternal dari negara tuan rumah apabila dihadapkan pada:

1. Suku bunga lokal yang rendah,
2. *Country risk* yang tinggi.

Apabila pasar-pasar keuangan saling tersegmentasi satu sama lain, biaya modal akan sangat tergantung dimana modal diperoleh. Perbedaan biaya modal dapat mempengaruhi keputusan pembiayaan perusahaan transnasional, suku bunga bervariasi dari suatu negara ke negara lain. Sehingga perusahaan transnasional mungkin bisa mendapatkan kredit/ hutang dengan biaya relatif murah dinegara-negara tertentu, sementara biaya dari kredit/ hutang dari negara-negara tertentu mungkin jauh lebih tinggi. Konsekuensinya, preferensi perusahaan transnasional tergantung pada suku bunga dimana perusahaan transnasional berada.

Jika perusahaan transnasional terekspos terhadap *country risk* yang tinggi, perusahaan dapat menggunakan pembiayaan hutang di negara tamu. Dalam hal ini, kreditor lokal telah meminjamkan uang kepada perusahaan transnasional akan sangat berkepentingan bahwa perusahaan transnasional diperlakukan secara adil oleh pemerintah mereka. Selain itu apabila operasi perusahaan transnasional

dinegara asing dihentikan oleh pemerintah tamu, perusahaan tidak akan merugi karena operasinya dibiayai oleh kreditor lokal. Strategi ini tidak lain adalah untuk membagi-bagi resiko yang dihadapi dengan sumber-sumber pembiayaan hutang di negara bersangkutan.

Dalam upaya mencapai kondisi ekonomi yang diinginkan kebijakan moneter di negara tamu berbeda dengan negara lainnya. Otoritas moneter menggunakan instrumen pengaturan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Ketika sektor riil membutuhkan ekspansi investasi yang lebih besar untuk mendorong perekonomian diperlukan suku bunga yang rendah. Namun apabila suku bunga meningkat, produksi secara aktual akan menurun. Sehingga suku bunga yang akan mempengaruhi daya beli perlu diperhatikan.

4.4.2 Kredit

Arti semula kredit dari kata *credere*, yang artinya kepercayaan. Kredit artinya penyediaan uang atau barang / jasa kepada pihak lain, tanpa imbalan secara langsung, tetapi dengan kepercayaan bahwa pihak penerima uang / barang tersebut akan mengembalikan hutangnya sesudah jangka waktu tertentu.

Pengertian Nasional sesuai UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

4.4.3 Tujuan Kredit

Tujuan kredit mencakup *scope* yang luas, ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan kredit adalah : (Sinungan Muchdarsyah, 1995 : 4 –9).

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan kredit berarti tidak lepas dari falsafah yang dianut oleh suatu negara karena pada dasarnya tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut, seperti pada negara-negara liberal di mana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Pemberian kredit yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit apabila nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya itu. Dari faktor kemauan dan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu unsur keamanan dan unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.

4.4.4 Fungsi Kredit

Kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikuti sertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang moneter, pengawasan devisa, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan

kredit yang diberikan oleh bank merupakan pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan daya guna dari modal atau uang
Yaitu para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya selain itu juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan.
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari suatu barang
Yaitu dengan mendapatkan kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.
- c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Yaitu kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.
- d. Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
Yaitu setiap orang dapat selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan oleh karena itu bantuan kredit yang diberikan oleh pihak bank akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha di bidang permodalan, sehingga para pengusaha dapat meningkatkan usahanya.

e. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Yaitu dalam keadaan kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain : mengendalikan inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

4.4.5 Jenis-jenis Kredit

4.4.5.1 Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai

4.4.5.1.1 Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu *cycle* usaha, hal ini kalau dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas/ bank ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan baik persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses, persediaan bahan baku. Dan apabila dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan *current liabilities*nya.

4.4.5.1.2 Kredit Investasi

Yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu *cycle* usaha, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran. (Teguh Pudjo Mulyono, 1990)
Misalnya seorang debitur mendapatkan kredit untuk mendirikan pabrik, atau mesin atau alat-alat angkutan ataupun barang modal lainnya. Uang kas yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang

modal tersebut akan baru dapat terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi/ depleksi/ amortisasinya sesuai jangka waktu ekonomisnya (*economical useful life*) yang mana dana depresiasi yang berupa *out of pocket cost* tersebut dikumpulkan, mungkin akan memakan waktu 5 tahun sampai dengan 20 tahun atau lebih.

4.4.5.2 Menurut Sektor Ekonomi

Untuk kepentingan perencanaan pengembangan kegiatan perekonomian maka pembagian sektor-sektor ekonomi mempunyai arti yang sangat penting. Penguasa moneter dan bank sentral mempunyai kepentingan utama dalam pembagian kredit menurut sektoral, sebagai alat perencanaan dan penendalian kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambilnya. Secara garis besar pembagian kredit menurut sektor ekonomi:

- a) Sektor pertanian, perkebunan, dan sarana pertanian
- b) Sektor pertambangan
- c) Sektor perindustrian
- d) Sektor listrik, gas, dan air
- e) Sektor konstruksi
- f) Sektor perdagangan, restoran, dan hotel
- g) Sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi
- h) Sektor jasa-jasa dunia usaha
- i) Sektor jasa-jasa sosial atau masyarakat

4.4.5.2.1 Kredit menurut keperluannya

1. Kredit Produksi / Eksploitasi, yaitu kredit yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun peningkatan kualitatif, Kredit ini disebut kredit Eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
2. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan dari suatu barang. Kredit perdagangan ini dapat terbagi dua yaitu Kredit Perdagangan Dalam Negeri dan Kredit Perdagangan Luar Negeri atau lebih dikenal dengan Kredit Ekspor dan Impor.
3. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun mendirikan usaha proyek baru. Ciri dari kredit ini adalah diperlukan untuk penanaman modal, mempunyai perencanaan yang terarah dan matang, dan waktu penyelesaian kredit berjangka menengah dan panjang.

4.4.5.2.2 Macam-Macam Kredit Menurut Jangka Waktu

Pembedaan menurut jangka waktu di Indonesia, disesuaikan dengan pengertian menurut pengaturan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit untuk jangka waktu kurang dari pada 1 tahun.
2. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 2-4 tahun.
3. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit untuk waktu 5 tahun atau lebih.

4.4.5.2.3 Kredit Menurut Cara Pemakaiannya

1. Kredit Rekening Koran Bebas

Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blanko cheque dan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan debitur atau nasabah bebas (tidak dibatasi) dalam melakukan penarikan – penarikan ke dalam rekening bersangkutan selama kredit berjalan. Jika penarikan-penarikan nasabah ke dalam rekeningnya melebihi jumlah maksimum kredit yang disetujui.

2. Kredit Rekening Koran Terbatas

Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah yang telah melakukan penarikan-penarikan ke rekeningnya. Pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang kartal dilakukan berangsur-angsur. Nasabah dilarang untuk melakukan penarikan uang sekaligus tetapi secara teratur serta disesuaikan dengan kebutuhannya.

3. Kredit Rekening Koran Aflopend

Penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya digunakan oleh nasabah. Yang diatur kemudian melalui rekening ini adalah saldo debit pada waktu tertentu yang harus benar-benar ditaati oleh nasabah.

4.5 Inflasi

Merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh manusia yang hidup dalam ekonomi uang, dimana daya beli yang ada dalam uang dengan berjalannya waktu mengalami erosi.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. (Boediono, 1985:161). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi. (Nopirin, 1987: 25). Atau dapat dikatakan, kenaikan harga barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan akan menyebabkan inflasi.

4.5.1 Jenis-Jenis Inflasi

Inflasi dapat digolongkan berdasarkan: sifat, sebab dan asal terjadinya (Nopirin, 1987). Inflasi menurut sifatnya digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Inflasi Merayap

Kenaikan harga terjadi secara lambat, dengan persentase yang kecil dan dalam jangka waktu yang relatif lama (di bawah 10% per tahun).

2. Inflasi Menengah

Kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi

3. Inflasi Tinggi

Kenaikan harga yang besar bisa sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukar dengan barang. Perputaran uang makin cepat, sehingga harga naik secara akselerasi.

Berdasarkan sebab terjadinya inflasi dibedakan menjadi:

1. *Demand – pull Inflation*

Demand pull inflation ditandai dengan adanya *inflationary gap*. *Inflationary gap* itu sendiri terjadi apabila keseimbangan GNP berada di atas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh (*full employment*). Inflasi bermula dengan adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*), sedangkan produksi telah berada pada kondisi *full employment*. Sehingga kenaikan permintaan ini hanya akan menaikkan harga saja.

2. *Cost – Push Inflation*

Proses kenaikan harga yang sering diikuti turunnya produksi disebut dengan *Cost Push Inflation*. Serikat buruh yang menuntut kenaikan upah, manajer dalam pasar monopolistis yang dapat menentukan harga (yang lebih tinggi), atau kenaikan harga bahan baku, misalnya krisis minyak adalah faktor yang dapat menaikkan biaya produksi. Kenaikan biaya ini pada akhirnya akan menaikkan harga dan turunnya produksi, atau terjadi penurunan penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Jika proses ini berlangsung terus maka timbul *cost push inflation*.

Menurut asalnya inflasi terdiri dari:

1. *Domestic Inflation*

Inflasi yang berasal dari dalam negeri sendiri seperti kenaikan konsumsi masyarakat, ekspansi moneter dan lain sebagainya.

2. *Imported Inflation*

Inflasi yang berasal dari luar negeri, seperti kenaikan harga-harga barang di negara-negara langganan dagang kita, mekanismenya baik melalui impor ataupun ekspor.

4.5.2 Teori Inflasi

Secara garis besar ada 3 kelompok teori mengenai inflasi yang masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu.

1. **Teori Kuantitas**

Teori kuantitas ini menyatakan bahwa proses inflasi itu terjadi karena 2 hal, yaitu jumlah uang beredar dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectations*). Ada 2 hal penting dari teori Kuantitas ini, adalah bahwa, pertama, laju inflasi terjadi jika ada penambahan volume uang beredar. Kedua, laju inflasi oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang (Boediono, 1985)

Ada 2 pendekatan yaitu, pendekatan persamaan pertukaran dan pendekatan Cambridge (Insukindro, 1993). Perbedaan kedua pendekatan tersebut adalah bahwa pendekatan persamaan cenderung menekankan pada faktor-faktor teknis yang menentukan kecepatan peredaran uang. Pada pendekatan Cambridge menekankan bahwa dengan stok uang yang tertentu, tingkat harga tergantung dari jumlah uang yang dipegang masyarakat.

Melalui pendekatan persamaan pertukaran, Irving Fisher menerangkan proses inflasi sebagai berikut:

$$M \cdot V = P \cdot T$$

Keterangan:

M : Jumlah uang beredar

V : Kecepatan peredaran uang dalam satu periode

P : Tingkat harga

T : Jumlah transaksi yang terjadi selama periode tertentu.

Arti dari persamaan di atas adalah total pengeluaran uang untuk barang dan jasa sama dengan total penerimaan uang hasil penjualan untuk barang dan jasa. Dengan asumsi bahwa kecepatan peredaran uang terjadi adalah antara jumlah uang beredar dan tingkat harga. Dengan demikian perubahan jumlah uang akan menyebabkan perubahan tingkat harga (Anton Hermanto, 1991: 5-7)

Menurut pendekatan Cambridge adalah sebagai berikut:

$$\frac{M}{P} = kY$$

Keterangan:

M : Jumlah uang beredar

P : Tingkat harga

k : Kecepatan peredaran uang

Y : Pendapatan riil

Apabila nilai k dan Y diasumsikan tetap dalam jangka pendek, maka suatu kelompok masyarakat cenderung memegang uang yang nilai riilnya sama dengan pendapatan riil mereka. Pendekatan ini menekankan pada motif seseorang dalam mengalokasikan kekayaan dalam bentuk uang (motif transaksi). Selain itu

pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa permintaan uang ditentukan oleh Y riil, tingkat suku bunga dan ekspektasi masa depan. Dalam kondisi keseimbangan di mana $M_d = M_s$, sehingga

$$M_d = k P Y$$

Keterangan, $V = 1/k$

Kondisi k dan Y dalam jangka pendek tidak berubah, kondisi ini mencerminkan Y riil dalam perekonomian *full employment* dan cara-cara pembayaran transaksi yang tetap. Dengan demikian tingkat harga tergantung dengan jumlah uang beredar.

2. Teori Keynes

Teori ini menerangkan bahwa proses inflasi terjadi karena permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Hal ini yang disebut dengan *inflationary gap*. *Inflationary gap* terjadi apabila jumlah dari permintaan-permintaan efektif dari semua golongan tersebut, pada tingkat harga yang berlaku melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat. Harga-harga akan naik, karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia.

Adanya kenaikan harga-harga tersebut berarti bahwa kegiatan rencana pembelian barang dari golongan-golongan tersebut tidak terpenuhi, selanjutnya mereka akan berusaha untuk memperoleh dana yang lebih besar lagi, baik golongan pemerintah melalui pencetakan uang baru, atau para pengusaha swasta melalui kredit dari bank, atau pekerja kenaikan tingkat upah yang lebih besar. Proses inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua

golongan masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan pada tingkat harga yang berlaku.

3. Teori Strukturalis

Teori Strukturalis lebih menekankan pada faktor-faktor struktural dari perekonomian yang menyebabkan terjadinya inflasi, teori ini disebut juga teori inflasi jangka panjang karena yang dimaksud dengan faktor-faktor struktural di sini adalah faktor-faktor yang hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang.

Teori struktural memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Ada dua ketegaran yang menyebabkan inflasi, yaitu ketegaran berupa ketidakelastisan dari penerimaan ekspor dan ketegaran berupa ketidakelastisan dari penawaran bahan makanan dalam negeri. Kedua proses di atas pada umumnya berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam menyebabkan inflasi.

Ketegaran yang merupakan “ketidakelastisan” dari penerimaan ekspor ini adalah ketegaran di mana nilai ekspor tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Dasar penukaran yang makin memburuk dan supply barang-barang ekspor yang tidak elastis ini akan menyebabkan terjadinya kelambanan tersebut. Kelambanan pertumbuhan penerimaan ekspor ini berarti kelambanan pertumbuhan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. Sedang bagi suatu negara untuk mencapai target pertumbuhannya mengambil kebijaksanaan pembangunan “*import substitution strategy*”. Inflasi terjadi jika proses substitusi impor ini makin meluas, sehingga menaikkan biaya produksi ke berbagai barang, sehingga makin banyak harga-harga yang naik.

Inflasi dapat terjadinya karena adanya kenaikan harga bahan makanan yang cenderung menaik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Kenaikan harga bahan makanan ini mengakibatkan timbulnya tuntutan kenaikan upah pekerja. Proses ini akan berhenti dengan sendirinya jika harga bahan-bahan makanan tidak terus menaik. Proses ini disebut ketegaran yang berupa ketidakelestarian dari penawaran bahan makanan dalam negeri.

4.5.3 Indikator Inflasi

Ada beberapa indikator yang digunakan oleh para ekonom untuk menggambarkan inflasi yaitu Indeks Biaya Hidup (IBH), Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Implisit Produk Domestik Bruto (GDP Deflator) atau Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Dari berbagai indikator tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan, serta sangat tergantung pada tujuan pemakaiannya. IBH dan IHK dimaksudkan untuk penetapan upah buruh riil, karena dengan indeks ini bisa melihat sejauh mana penurunan daya beli yang terjadi pada kaum buruh akibat inflasi. Untuk pembuatan kontrak kerja dan penyesuaian harga yang dilakukan kontraktor besar, biasanya menggunakan IHPB. GDP Deflator yang mempunyai cakupan lebih luas dibandingkan kedua indeks terdahulu, sebenarnya mencerminkan perkembangan tingkat harga umum. Kelemahan dasar penggunaan IBH sebagai indikator inflasi yaitu:

- 1) Angka indeks tersebut tidak mengikuti perkembangan nilai mata uang sehingga kebijaksanaan pemerintah dan pola konsumsi sudah berubah (banyak barang yang tercakup dalam IBH sudah tidak dijual lagi).
- 2) IBH tersebut terbatas hanya mencakup pengeluaran buruh kelas bawah dan jumlah sampel relatif kecil.

- 3) Banyaknya barang dan jasa yang diamati perubahan harganya hanya 62 macam dengan ketentuan yang sederhana yaitu bila barang yang tidak nampak di pasar maka diganti dengan barang lain yang diperkirakan bisa menjadi substitusinya.
- 4) Faktor penimbangannya menjadi tidak realistis.

Penggunaan indikator inflasi di Indonesia berganti dengan IHK karena kelemahan-kelemahan IBH tersebut di atas. IHK dimaksudkan sebagai pengukur perkembangan daya beli rupiah yang dibelanjakan oleh setiap rumah tangga untuk membeli suatu barang dan jasa dari bulan ke bulan. Cakupan IHK ini jauh lebih luas dibandingkan dengan IBH, karena selain jumlah barangnya jauh lebih banyak, survei dan pencatatan harga tersebar di 17 ibukota propinsi di Indonesia. IHK nasional diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang dari IHK ke 17 ibukota propinsi tersebut, dengan timbangan jumlah penduduk masing-masing kota.

Perhitungan laju inflasi tahunan yang menggunakan IHK dilakukan dengan menjumlahkan laju inflasi bulanan selama satu tahun dan bukan memakai dasar perubahan satu masa ke masa lainnya. Oleh karena itu penggunaan IBH dan IHK yang digabungkan dalam seri waktu sebagai indikator inflasi kurang tepat, akan tetapi IHK tetap digunakan sebagai pengukur laju inflasi oleh pemerintah karena praktis dan ketersediaan data yang ada.

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) secara umum dapat digunakan sebagai indikator inflasi atau deflasi suatu negara sebagai dasar untuk menentukan kebijaksanaan di bidang harga-harga, karena harga perdagangan besar merupakan *price leader* pendapatan nasional dan sebagai salah satu indikator dari analisis pasar, politik moneter dan sebagainya. Namun data IHPB nampak kurang

memadai bila digunakan sebagai indikator inflasi, karena adanya perbedaan timbangan pada periode yang berbeda sehingga dapat menyulitkan perubahan tahun dasar dan juga IHPB hanya mencakup 241 jenis barang yang diperdagangkan pada tingkat grosir di 76 kota besar di Indonesia.

GDP Deflator atau Indeks Implisit GDP mencerminkan perkembangan harga-harga umum (*general price index*), sehingga sebenarnya GDP Deflator inilah yang paling tepat digunakan sebagai indikator inflasi, karena inflasi sendiri merupakan kenaikan tingkat harga umum secara terus menerus. GDP Deflator merupakan resultan dari perkembangan harga-harga komoditi, yang diperoleh dengan membagi besarnya GDP menurut harga berlaku dengan GDP menurut Harga Konstan tahun tertentu. GDP Deflator masih kurang mencerminkan perkembangan tingkat harga umum, karena hasil perhitungan GDP masih kurang memuaskan dan juga tidak memperhitungkan terjadinya nilai tukar antara harga barang dan jasa yang diekspor dengan yang diimpor. ¹

Ketiga macam indikator inflasi di atas (IBH/IHK/IHPB dan GDP Deflator), nampaknya hanya IBH/IHK dan GDP Deflator yang relatif memungkinkan digunakan sebagai indikator inflasi di Indonesia, karena kedua indikator tersebut telah memperhitungkan pengaruh perubahan nilai tukar perdagangan antara harga barang dan jasa yang diekspor dengan yang diimpor. IBH/IHK bisa digunakan karena faktor tersedianya data dan terutama karena digunakannya IBH/IHK sebagai indikator secara resmi oleh pemerintah.

Pengendalian laju inflasi tentu saja tidak lepas dari pengendalian yang dilakukan oleh otoritas moneter dari sisi intern dalam rangka mencari stabilitas ekonomi sebagai salah satu tujuan pembangunan. Laju inflasi sebelum tahun 1984

mendekati bahkan melebihi 10%, hal ini tentu saja tidak lepas dari berbagai pengaruh faktor ekstern terhadap perekonomian Indonesia.

Deregulasi dan debirokratisasi 1 Juni 1983, merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan ekonomi. Perkembangan moneter tahun 1984 yang relatif stabil tercermin dari pertambahan uang beredar yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan tingkat laju inflasi yang dapat dikendalikan. Piranti-piranti kebijakan moneter untuk pengendalian jumlah uang beredar yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- (1) Perubahan tingkat bunga fasilitas diskonto
- (2) Perubahan rasio cadangan minimum
- (3) Perkreditan selektif
- (4) Operasi Pasar Terbuka
- (5) Pendekatan persuasif

4.6 Investasi di Negara Berkembang

Investasi mempunyai arti penting bagi negara berkembang terutama dalam mengatasi masalah-masalah yang bisa dijumpai di kebanyakan negara berkembang seperti rendahnya produktivitas yang diakibatkan rendahnya pembentukan modal dan besarnya jumlah penduduk.

Rendahnya pembentukan modal dinegara berkembang diterangkan oleh Nurske (1953;43) melalui teorinya tentang lingkaran perangkap kemiskinan. Disatu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan dilain pihak oleh perangsang intik menanam modal. Dan dinegara berkembang keadaan dua faktor tersebut tidak memungkinkan dilaksanakanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi menurut pandangan Nurske, terdapat dua jenis lingkaran

perangkap kemiskinan yang menghalangi negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu dari segi penawaran modal dan permintaan modal.

Dari segi penawaran modal, lingkaran perangkap kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas rendah, menyebabkan kemampuan menabung rendah. Keadaan yang terakhir ini selanjutnya akan dapat menyebabkan suatu negara akan menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitas tetap rendah.

Dari segi permintaan modal, dapat dijelaskan sebagai berikut. Negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal yang terakhir disebutkan ini diakibatkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Sedangkan pendapatan yang rendah diakibatkan oleh produktivitas yang rendah, yang diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk penanaman modal.

Ketimpangan-ketimpangan investasi yang sering terjadi antara lain dapat dilihat dari 3 segi yaitu:

1. Ketimpangan investasi secara sektoral, sebagian besar modal yang ditanam menumpuk disektor industri pengolahan.
2. Ketimpangan investasi secara regional, dimana wilayah Indonesia dibagi menurut pembagian kawasan, pembagian propinsi.
3. Ketimpangan antara rencana dan realisasi, dimana realisasi investasi swasta Indonesia selama ini sangat rendah.

Jinghan (1996;106) menyebutkan bahwa rata-rata investasi kotor negara-negara berkembang hanya 5 sampai 6% dari pendapatan nasional kotor, sedangkan dinegara maju berkisar antara 15 sampai 20%. Laju pertumbuhan investasi yang rendah seperti itu hampir tidak cukup untuk menghadapi pertumbuhan penduduk yang cepat dengan laju 2 sampai 2,5 % per tahun, apalagi menginvestasikan di proyek-proyek baru. Dengan laju tabungan yang ada, hampir tidak dapat menutupi penyusutan modal dan bahkan untuk mengganti peralatan modal yang ada. Usaha memobilisasi tabungan domestik melalui perpajakan pinjaman masyarakat hampir tidak cukup untuk menaikkan laju pembentukan modal yang ada melalui investasi.

Dalam hal ini kiranya PMDN dapat membantu kekurangan tabung domestik melalui peralatan modal dan bahan mentah, sehingga menikkan laju tabungan marginal dan pembentukan modal.

Penggunaan modal dalam negeri bagi negara berkembang dapat pula membantu pembangunan-pembangunan yang sekaligus mengurangi kekurangan overhead ekonomi yang sangat penting untuk lebih mempermudah investasi seperti proyek jalan raya, sungai bendungan, jalan kereta api atau infrastruktur yang lain. Hal tersebut merupakan beban yang berat bagi negara berkembang untuk membangun semua ini tanpa dukungan modal dalam negeri.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Metode Penelitian.

5.1.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari variabel dependen yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta dan variabel independen yaitu, Produk Domestik Regional Bruto propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tingkat suku bunga kredit investasi Bank Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Laju Inflasi di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta variabel dummy pengaruh masa krisis moneter dan sebelum krisis.

Data sekunder ini bersumber dari BPS (Biro Pusat statistik), propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bank Indonesia kantor Cabang Yogyakarta, Bappenas propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pihak lain yang berkompeten dengan publikasi data yang relevan dengan penelitian ini, dengan kurun waktu antara tahun 1985 sampai dengan 2005.

5.1.2. Definisi Variabel

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Adalah keseluruhan Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah disetujui oleh pemerintah menurut kegiatan sektor ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bappenas berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk juta Rp per tahun.

b. PDRB propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian daerah baik yang dilakukan oleh penduduk domestik maupun penduduk asing maupun orang-orang dari negara lain yang berrnukim di wilayah daerah yang bersangkutan

Data Produk Domestik Regional Bruto untuk Daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar harga konstan 2000. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan perhitungan tahunan kemudian diolah dan dinyatakan dalam bentuk satuan juta rupiah.

c. Suku Bunga Kredit Investasi

Yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu *cycle* usaha, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali

menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran. (Teguh Pudjo Mulyono, 1990)

Data tingkat suku bunga yang digunakan adalah data tingkat suku bunga kredit investasi rata-rata tertimbang pada bank umum di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kurun waktu 1985 – 2005. Sumber data di keluarkan dari Bank Indonesia kantor cabang Yogyakarta dalam berbagai edisi dengan pengolahan awal untuk disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dinyatakan dengan satuan persen (%).

d. Inflasi

Adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. (Boediono, 1985:161)

Data inflasi yang dipergunakan adalah data laju inflasi tahunan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berbagai edisi dengan olahan dengan satuan persen (%).

e. Krisis Moneter

Adalah dummy Variabel yaitu masa penetapan masa krisis ekonomi dan sebelum krisis ekonomi untuk melihat pengaruh pada variabel dependen yang ditetapkan sebagai berikut :

- periode tahun 1985 – 1996 adalah masa sebelum krisis, dummy variabel : 0
- periode tahun 1997 – 2005 adalah masa setelah krisis, dummy variabel : 1

5.2. Metode Analisis Data

5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan Metode Regresi Kuadrat Terkecil/OLS (*ordinary least square*), dengan fungsi PMDN DIY = f (Produk Domestik Regional Bruto, Suku Bunga Kredit Investasi Bank Umum, Inflasi, dan Dummy Krisis Ekonomi), maka persamaan regresinya adalah: (Gujarati, 2003)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 D_m + e$$

Keterangan:

- Y : PMDN (juta Rp)
X₁ : Total PDRB (juta Rp)
X₂ : Tingkat suku bunga kredit investasi (%)
X₃ : Laju Inflasi (%)

Dm : Dummy variabel untuk melihat pengaruh adanya krisis ekonomi /moneter terhadap PMDN D.I.Y.

Dm = 0, sebelum masa krisis moneter

Dm = 1, sesudah masa krisis moneter

β_0 : Konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi

e : Kesalahan pengganggu

Pengujian analisis regresi meliputi uji diagnostik yaitu uji t-statistik, uji f-statistik, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

5.2.2. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini menggunakan uji *Mackinnon*, *White and Davidson* (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan di gunakan berbentuk linier atau log linier. (Widarjono, 2005).

Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut :

$$\text{Linier } Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Dm + e$$

$$\text{Log Linier } Y = \alpha_0 + \alpha_1 \log X_1 + \alpha_2 \log X_2 + \alpha_3 \log X_3 + \alpha_4 Dm + e$$

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa:

H0 : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X

(model linier)

H1 : Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X

(model log linier).

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut :

1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) dan selanjutnya dinamai F_1 .
2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F_2 .
3. Dapatkan nilai $Z_1 = \ln F_1 - F_2$ dan $Z_2 = \text{antilog } F_2 - F_1$
4. Estimasi persamaan berikut ini :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Dm + e$$

Jika Z_1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nul dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul dan model yang tepat digunakan adalah model linier

5. Estimasi persamaan berikut :

$$6. Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln x_1 + \alpha_2 \ln x_2 + \alpha_3 \ln x_3 + \alpha_4 Dm + \alpha_7 z_2 + e$$

Jika Z_2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan

adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linier.

5.2.3. Uji Statistik

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan beberapa pengujian :

a. Uji t-Statistik

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis yang digunakan :

a. Jika Hipotesis positif

$H_0 : \beta_i \leq 0$, Tidak ada pengaruh antara variabel dependen dan independen.

$H_a : \beta_i > 0$, Ada pengaruh variabel dependen dan independen.

b. Jika Hipotesis negatif

$H_0 : \beta_i \geq 0$, Tidak ada pengaruh antara variabel dependen dan independen.

$H_a : \beta_i < 0$, Ada pengaruh variabel dependen dan independen.

2. Pengujian satu sisi

Jika $T_{\text{tabel}} \geq t_{\text{hitung}}$, H_0 diterima berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $T_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$, H_0 ditolak berarti variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F-Statistik

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu dengan cara sebagai berikut :

$H_0 : \beta_i = 0$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

$H_a : \beta_i \neq 0$, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Hasil pengujian adalah :

H_0 diterima (tidak signifikan) jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}} (df = n-k)$

H_0 ditolak (signifikan) jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} (df = n - k)$

Dimana :

K : Jumlah variabel

N : Jumlah pengamatan

c. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R^2 semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen.

Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R^2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

5.2.4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi klasik dilakukan untuk melengkapi uji statistik yang telah dilakukan sebelumnya yaitu uji F dan uji T. Pengujian asumsi klasik meliputi uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Autokorelasi

Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan, pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson (DW)*, yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistik (d) dengan d_L dan d_U , jika DW statistik berada diantara d_U dan $4 - d_U$ maka tidak ada autokorelasi.

Gambar 5.1
Daerah Autokorelasi

Kriteria Pengambilan Keputusan :



Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan jelas dalam gambar 5.2 berikut ini : (Widarjono; 2005)

Tabel 5.2
Uji Statistik Durbin-Watson

Nilai Statistik	Hasil
$0 < d < d_l$	Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi positif
$d_l \leq d \leq d_u$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$d_u \leq d \leq 4 - d_u$	Menerima hipotesis nul; tidak ada autokorelasi positif/negatif
$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4 - d_l \leq d \leq 4$	Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi negatif

Atau dengan cara lain untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model bisa dilakukan menggunakan uji LM atau *Lagrange Multiplier*. Salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh

autokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan *lag* variabel dependen kedalam model regresi.

Misalnya pada model regresi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Dm + e$$

yang diyakini terdapat autokorelasi, untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi dalam model regresi tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan *lag* variabel dependen (Y) ke dalam model sehingga model regresi tersebut menjadi.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Dm + b_7Y_{(t-1)}.$$

b. Multikolinearitas

Adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen, pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi parsial, (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2) regresi awal atau yang disebut dengan metode *Klein rule of Thumbs*. Jika $r^2 < R^2$ maka tidak ada multikolinearitas. (Gujarati ; 2003).

c. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan *White Test*, yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat (U_i^2) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas.

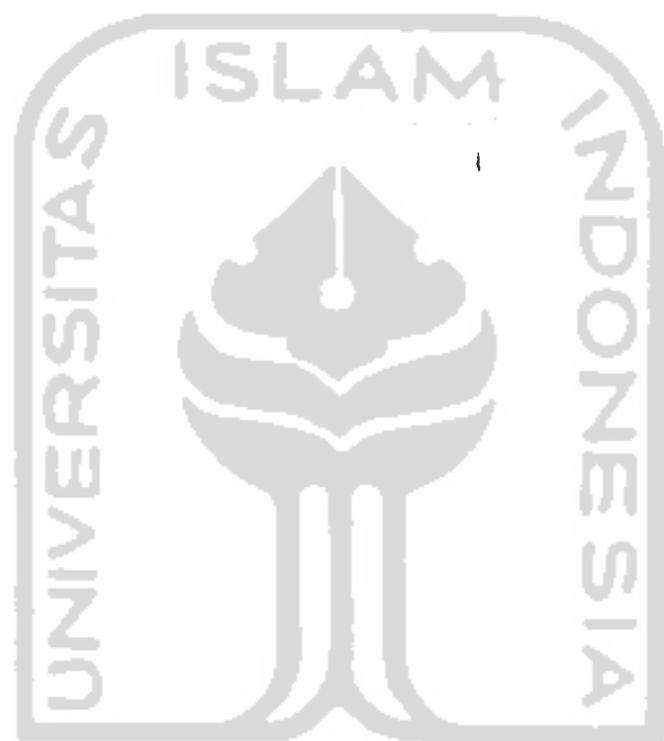
Dapatkan nilai R^2 untuk menghitung χ^2 , di mana $\chi^2 = \text{Obs} * R \text{ square}$ (Gujarati, 2003).

Uji White Test

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas.

- $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_q = 0$, Tidak ada heterokedastisitas
- $H_a : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_q \neq 0$, Ada heterokedastisitas

Perbandingan antara $\text{Obs} * R \text{ square}$ ($\chi^2_{\text{-hitung}}$) dengan $\chi^2_{\text{-tabel}}$ yang menunjukkan bahwa $\text{Obs} * R \text{ square}$ ($\chi^2_{\text{-hitung}} < \chi^2_{\text{-tabel}}$), berarti H_0 tidak dapat ditolak. Dari hasil uji *White Test* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas. Sedangkan jika nilai $\text{Obs} * R \text{ square}$ ($\chi^2_{\text{-hitung}} > \chi^2_{\text{-tabel}}$), berarti H_0 dapat ditolak. Dari hasil uji *White Test* tersebut dapat disimpulkan bahwa ada heterokedastisitas



جامعة الإسلام في إندونيسيا

BAB VI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

6.1.1. Pemilihan Model Regresi

Penentuan pemakaian bentuk suatu fungsi model empirik dinyatakan dalam bentuk linear ataukah nonlinear dalam suatu penelitian. Maka dalam penelitian ini akan dilakukan uji MacKinnon, White, Davidson (MWD test). Hasil estimasi dari uji MWD dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 6.1
Hasil Uji MWD

Variabel	Nilai Statistik t	Nilai Tabel t α (=5%)	Probabilitas
Z1	1,552108	1,746	0,1578
Z2	-1,486770	1,746	0,1415

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* (lampiran)

Berdasarkan dari hasil regresi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji MWD ditemukan adanya perbedaan antara kedua bentuk fungsi model empiris (linier dengan log-linier). Dengan derajat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) bentuk fungsi model empiris linier maupun bentuk fungsi model log linier sama-sama bisa digunakan untuk analisis, karena Z_1 tidak signifikan secara statistik dengan probabilitasnya sebesar 0,1578 dan Z_2 juga tidak signifikan secara statistik

dengan probabilitasnya sebesar 0,7483. Dengan demikian penentuan bentuk fungsi model empiris (linier dengan log-linier) menggunakan R-square pada hasil uji statistik, dimana ditunjukkan pada pengolahan statistik sebagai berikut :

Tabel 6.2
Uji R-square

Model	Nilai R-square	Keterangan
Linier	0,875229	Mampu Menjelaskan
Log-linier	0,975340	Lebih Mampu menjelaskan

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* (lampiran)

Dengan perbandingan R-square, maka nilai hasil uji R-square yang paling dominan / lebih besar dapat dikatakan lebih mampu menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

6.1.2. Hasil Regresi

Hasil regresi ini menggunakan alat bantu yaitu program komputer *Eviews* 4.1. Hasil regresi loglinier berganda yang di dapat adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3
Hasil Regresi Log-Linear

Dependent Variable: LOG(PMDN)				
Method: Least Squares				
Date: 07/24/07 Time: 17:56				
Sample: 1985 2005				
Included observations: 21				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	3.601663	0.261275	13.78493	0.0000
LOG(SBKI)	0.274535	0.246286	1.114698	0.2814
LOG(INF)	-0.007872	0.056787	-0.138627	0.8915
DM	0.209164	0.141372	1.479527	0.1584
C	-45.91754	4.479253	-10.25116	0.0000
R-squared	0.975340	Mean dependent var		13.44324
Adjusted R-squared	0.969174	S.D. dependent var		1.060045
S.E. of regression	0.186114	Akaike info criterion		-0.320656
Sum squared resid	0.554216	Schwarz criterion		-0.071960
Log likelihood	8.366890	F-statistic		158.2033
Durbin-Watson stat	0.827020	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* (lampiran)

6.1.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. R^2 dalam regresi sebesar 0,975340. Ini berarti variabel Penanaman Modal Dalam Negeri di Propinsi DI Yogyakarta dapat dijelaskan oleh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi Bank Umum, Tingkat Inflasi, dan dummy variabel krisis dan pasca krisis moneter sebesar 97,53 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

6.1.4. Pengujian t-Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. (Gujarati, Damodar 2003)

$$t\text{-tabel} = \{ \alpha ; df (n-k) \}$$

$$t\text{-hitung} = \frac{bi}{Se(bi)}$$

Keterangan :

α = *Level of significance*, atau probabilitas menolak hipotesis yang benar.

n = Jumlah sampel yang diteliti.

K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta.

Se = Standar error.

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (*one tail test*), dengan $\alpha = 5 \%$.

Jika $t\text{-tabel} < t\text{-hitung}$ berarti H_0 ditolak atau variabel X_i berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika $t\text{-tabel} \geq t\text{-hitung}$ berarti H_0 diterima atau variabel X_i tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

TABEL 6.4
HASIL UJI t-STATISTIK

Variabel	Koefisien	t-hitung	t-tabel	Keterangan
PDRB	3,601663	13,78493	1,746	Signifikan
SBKI	0,274535	1,114698	1,746	Tidak Signifikan
INF	-0,007872	-0,138627	1,746	Tidak Signifikan
DM	0,209164	1,479527	1,746	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* (lampiran)

1. Uji t-Statistik Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Hipotesis pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap variabel yang digunakan adalah : (Uji satu sisi negatif)

- $H_0 : \beta_1 \geq 0$, berarti variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di propinsi DI. Yogyakarta
- $H_a : \beta_1 < 0$, berarti variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di propinsi DI. Yogyakarta

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung PDRB = 13,78493 sedangkan t-tabel = 1,746 (df (n-k) = 16 , $\alpha = 0,05$) sehingga t-hitung > t-tabel (|13,78493| > |1,746|). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta.

2. Uji t-Statistik Variabel Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI)

Hipotesis pengaruh variabel Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI) terhadap variabel Penanaman Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta, yang digunakan adalah :

- $H_0 : \beta_2 \geq 0$, berarti variabel Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI) tidak berpengaruh terhadap variabel variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di propinsi DI Yogyakarta.
- $H_a : \beta_2 < 0$, berarti variabel Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI) berpengaruh terhadap variabel variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di propinsi DI Yogyakarta.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung SBKI = 1,114698 sedangkan t-tabel = 1,746 (df (n-k) = 16 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung < t-tabel (|1,114698| < |1,812|). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Suku Bunga Kredit Investasi Bank Umum secara statistik positif dan tidak signifikan Penanaman Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta.

3. Uji t-Statistik Variabel Inflasi (INF)

Hipotesis pengaruh variabel Inflasi (INF) terhadap variabel Penanaman Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta yang digunakan adalah : (Uji satu sisi negatif)

- $H_0 : \beta_3 \geq 0$, berarti variabel Inflasi (INF) tidak berpengaruh terhadap variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di propinsi DI Yogyakarta.
- $H_a : \beta_3 < 0$, berarti variabel Inflasi (INF) berpengaruh terhadap variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di propinsi DI Yogyakarta.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung INF = -0,138627 sedangkan t-tabel = 1,746 (df (n-k) = 16 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung < t-tabel (|-0,138627| < |1,812|). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi di propinsi DI. Yogyakarta secara statistik negatif dan tidak signifikan Penanaman Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta.

4. Uji t-Statistik Variabel Dummy Masa sebelum dan setelah Krisis Moneter (DM)

Hipotesis pengaruh variabel Dummy masa sebelum dan setelah Krisis Moneter (DM) terhadap variabel Penanaman Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta yang digunakan adalah :

- $H_0 : \beta_1 \geq 0$, berarti variabel Dummy Masa sebelum dan setelah Krisis Moneter (DM) tidak berpengaruh terhadap variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di propinsi DI Yogyakarta.
- $H_a : \beta_1 < 0$, berarti variabel Dummy masa sebelum dan setelah Krisis Moneter (DM) berpengaruh terhadap variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di propinsi DI Yogyakarta.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung DM = 1,479527 sedangkan t-tabel = 1,746 (df (n-k) = 16 , $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung > t-tabel (|1,479527| < |1,812|). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dummy masa sebelum dan setelah Krisis Moneter secara statistik positif dan tidak signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di propinsi DI Yogyakarta.

6.1.5. Pengujian F-Statistik

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian F-statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. (Gujarati, Damodar 2003)

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

$$F\text{-tabel} = (\alpha : k-1, n-k) \quad \alpha = 5 \% , (5-1=4 ; 21-5=16)$$

Jika $F\text{-tabel} < F\text{-hitung}$ berarti H_0 ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika $F\text{-tabel} \geq F\text{-hitung}$ berarti H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah :

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel independen.
- $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel independen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah $F\text{-hitung} = 158,2033$ sedangkan $F\text{-tabel} = 3,01$ ($\alpha = 0,05 ; 3,01$), sehingga $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($158,2033 > 3,01$).

Perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel yang menunjukkan bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI), Inflasi (INF) dan Dummy Variabel masa sebelum dan setelah krisis moneter (DM) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di propinsi DI Yogyakarta.

6.2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu pengujian multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

6.2.1. Autokorelasi.

Autokorelasi merupakan adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain. Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau dengan uji LM Test yang dikembangkan oleh Bruesch-godfrey, dimana uji LM Test bisa dikatakan sebagai uji autokorelasi yang paling akurat, apalagi jika sampel yang digunakan dalam jumlah yang besar (misalnya diatas 100). Uji ini dilakukan dengan

memasukkan lagnya, dari hasil uji autokorelasi *Serial Correlation LM Test Lag*.

Uji Lagrange Multiplier (LM Test).

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi.

- $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_q = 0$, Tidak ada autokorelasi
- $H_a : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_q \neq 0$, Ada autokorelasi

Hasil perhitungan yang didapat adalah $Obs \cdot R^2$ (χ^2 -hitung) = 15.43001 sedangkan χ^2 -tabel = 15,5073 ($df = 8$, $\alpha = 0,05$), sehingga χ^2 -hitung < χ^2 -tabel (15.43001 < 15,5073). Perbandingan antara χ^2 -hitung dengan χ^2 -tabel, yang menunjukkan bahwa χ^2 -hitung < χ^2 -tabel, berarti H_0 tidak dapat ditolak. Dari hasil uji LM tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

**TABEL 6.5
HASIL UJI LM**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.770203	Probability	0.085481
Obs*R-squared	15.43001	Probability	0.051304

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* (lampiran)

6.2.2 Multikolinieritas.

Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen atau variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Deteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan metode Klein, yaitu dengan membandingkan koefisien determinasi parsial (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2), jika ditemukan nilai r^2 lebih kecil dari R^2 maka tidak ada multikolinieritas. Sebaliknya jika ditemukan nilai r^2 lebih besar dari R^2 maka ada multikolinieritas (Gujarati, 1995; 166).

TABEL 6.6
HASIL PENGUJIAN MULTIKOLINIERITAS

Variabel	r^2	R^2	Keterangan
PDRB dengan SBKI, INF, DM	0,657615	0,975340	Tidak ada multikolinieritas
SBKI dengan PDRB, INF, DM	0,193383	0,975340	Tidak ada multikolinieritas
INF dengan PDRB, SBKI, DM	0,215776	0,975340	Tidak ada multikolinieritas
DM dengan PDRB, SBKI, INF	0,663004	0,975340	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* (lampiran)

Hasil *Uji Klien* diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas karena nilai r^2 lebih kecil dari R^2 .

6.2.3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Adanya heteroskedastisitas dalam model analisis mengakibatkan varian dan koefisien-koefisien OLS tidak lagi minimum dan penaksir-penaksir OLS menjadi tidak efisien meskipun penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah pengujian *White*, langkah pengujiannya antara lain:

1. Estimasi persamaan model dan dapatkan residualnya.
2. Melakukan regresi pada persamaan berikut yang disebut regresi *auxiliary*
3. Hipotesis nul dalam uji ini adalah tidak ada heteroskedastisitas. Uji *White* didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R^2 yang akan mengikuti distribusi Chi-squares dengan *degree of freedom* sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi *auxiliary*. Nilai hitung statistik Chi-squares (χ^2) dapat dicari dengan formula sebagai berikut:

$$n R^2 \approx \chi^2_{df}$$

4. Jika nilai Chi-squares hitung ($n \cdot R^2$) lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas

dan sebaliknya jika Chi-squares hitung lebih kecil dari nilai χ^2 kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan bantuan program komputer Eviews 4.1, dan diperoleh hasil regresi seperti pada tabel berikut ini:

TABEL 6.7
HASIL UJI WHITE TEST

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	2.466822	Probability	0.075866
Obs*R-squared	11.98050	Probability	0.101202

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* (lampiran)

Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square (χ^2 -hitung) = 11.98050 sedangkan χ^2 -tabel = 15,5073 (df = 8, $\alpha = 0,05$), sehingga χ^2 -hitung < χ^2 -tabel (11.98050 < 15,5073). Perbandingan antara χ^2 -hitung dengan χ^2 -tabel, yang menunjukkan bahwa χ^2 -hitung < χ^2 -tabel, berarti H_0 tidak dapat ditolak. Dari hasil uji White Test tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas.

6.3. Interpretasi Hasil Regresi

Hasil estimasi dan pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan ternyata hasil estimasi penanaman modal dalam negeri di propinsi DI Yogyakarta tidak terdapat Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan

Autokorelasi sehingga hasil dari pengujian tersebut dapat diaplikasikan lebih lanjut.

6.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PRDB)

Berdasarkan hasil uji statistik, Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) secara statistik positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta sebesar 3,60166. Artinya setiap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) sebesar 1 persen mengakibatkan peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta sebesar 0,0360166 persen. Produk Domestik Regional Bruto memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta. Artinya semakin tinggi laju Produk Domestik Regional Bruto yang mencerminkan semakin maraknya kegiatan perekonomian masyarakat yang didukung oleh faktor-faktor pendukung perekonomian (antara lain, stabilitas politik dan keamanan nasional) akan mampu mendorong peningkatan usaha Penanaman Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta dan sebaliknya semakin rendah Produk Domestik Regional Bruto akan melemahkan usaha Penanaman Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta.

6.3.2. Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI) Bank Umum

Berdasarkan hasil uji statistik, variabel Suku Bunga Kredit Investasi (SBKI) secara statistik positif dan tidak signifikan terhadap Penanaman

Modal Dalam Negeri di propinsi DI Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan tingkat suku bunga kredit investasi (SBKI) tidak akan menyebabkan terjadinya kenaikan penanaman modal dalam negeri di propinsi DI Yogyakarta. Tidak signifikannya tingkat suku bunga kredit investasi bank umum terhadap penanaman modal dalam negeri di propinsi DI Yogyakarta lebih disebabkan karena tingkat suku bunga kredit investasi bank umum di propinsi DI Yogyakarta bukan satu-satunya penyuplai investasi bagi investor, kemungkinan dana dari luar daerah yang masuk digunakan sebagai investasi di propinsi DI Yogyakarta juga sangat mungkin terjadi mengingat begitu banyak investor pendatang yang memulai investasi dengan peluang-peluang yang menjanjikan di wilayah propinsi DI Yogyakarta, selain itu apabila dikaitkan dengan tingkat suku bunga kredit investasi bank umum, investor lebih memandangi tingkat keuntungan yang lebih menjanjikan daripada besarnya tingkat suku bunga kredit investasi di propinsi DI Yogyakarta, dengan demikian menyimpulkan bahwa kenaikan tingkat suku bunga kredit investasi bank umum di propinsi DI Yogyakarta tidak berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri di propinsi DI Yogyakarta.

6.3.3. Inflasi (INF)

Variabel tingkat inflasi (INF) secara statistik negatif dan tidak signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri di propinsi DI

Yogyakarta, Hal ini lebih menunjukkan bahwa laju inflasi yang terjadi di propinsi DI Yogyakarta tidak memberikan pengaruh terhadap pergerakan usaha investasi penanaman modal dalam negeri di propinsi DI Yogyakarta. Beberapa penyebab terjadi hal ini, lebih didominasi oleh faktor kepercayaan investor yang tumbuh akan potensi profit / keuntungan yang terkandung dalam usaha penanaman modal dalam negeri di propinsi DI Yogyakarta. Segmen pasar yang terbentuk di wilayah propinsi DI Yogyakarta merupakan segmen yang selalu menjanjikan, dalam artian iklim pasar yang terbentuk merupakan iklim pasar yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, dalam hal ini lebih mengacu pada target masyarakat DI Yogyakarta yang notabene adalah pendatang dengan mayoritas perilaku pasarnya erat kaitannya dengan dunia pendidikan (mahasiswa, pelajar, dan dosen) dengan potensi daya beli yang bersifat kontinyu.

6.3.4. Dummy Variabel Masa sebelum dan sesudah krisis moneter (DM)

Dummy Variabel Masa sebelum dan sesudah krisis moneter (DM) secara statistik negatif dan tidak signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri di propinsi DI Yogyakarta. Artinya masa krisis moneter, baik itu masa sebelum dan sesudah krisis moneter tidak memberikan pengaruh bagi usaha penanaman modal dalam negeri. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, dalam hitungan range waktu tahun 1985-2005 bagi para investor dipandang sebagai halangan sesaat yang mengganjal kondisi perekonomian secara nasional, akan tetapi dampak dari semua itu dalam

pandangan pelaku investasi di wilayah propinsi DI Yogyakarta, potensi keuntungan dan beberapa nilai tambah ekonomis lebih besar dibandingkan dengan pengaruh dari krisis moneter yang terjadi, sehingga ketertarikan pelaku investasi di propinsi DI Yogyakarta tidak dipengaruhi oleh keterpurukan krisis ekonomi secara nasional.



BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang parameternya menggunakan metode OLS telah mengungkapkan pengaruh dari produk domestik regional bruto (PDRB), suku bunga kredit investasi (SBKI) Bank Umum, Inflasi (INF), dan dummy variabel (DM) masa sebelum dan sesudah krisis moneter, maka dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk domestik regional bruto (PDRB), suku bunga kredit investasi (SBKI) Bank Umum, Inflasi (INF), dan dummy variabel (DM) masa sebelum dan sesudah krisis moneter secara keseluruhan mempengaruhi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini terlihat dari pengujian serentak yang telah dilakukan.
2. Produk domestik regional bruto (PDRB), suku bunga kredit investasi (SBKI) bank umum, Inflasi (INF), dan dummy variabel (DM) masa sebelum dan sesudah krisis moneter mampu menjelaskan proporsi pengaruh variasi total dari penanaman modal dalam negeri yang dicerminkan dalam penghitungan koefisien determinasi (R^2) dalam model statistik.

3. Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel suku bunga kredit investasi (SBKI) bank umum berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel inflasi (INF) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel dummy (DM) masa sebelum dan sesudah krisis moneter berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

7.2. IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, implikasi kebijaksanaan berkaitan dengan hasil penelitian adalah :

1. Usaha pemerintah melalui media kebijaksanaan yang mengacu pada pengembangan output-output sektoral hendaklah menjadi alternatif utama dalam pengembangan penanaman modal dalam negeri, di wilayah propinsi DI Yogyakarta dalam batasan penjaminan mutu dan kualitas investasi yang lebih tercermin pada potensi regional yang terkandung didalamnya nilai profitabilitas dan pengembangan perekonomian nasional.
2. Perkembangan perekonomian yang tercermin dari laju pertumbuhan produk domestik regional bruto di propinsi DI Yogyakarta memberikan nilai tambah dalam usaha pengembangan penanaman modal dalam negeri melalui tumbuh berkembangnya perekonomian secara umum, dimana didalamnya terlihat adanya kestabilan politik, dan keamanan nasional untuk bebas meluasa memegang kepercayaan investor dalam proses penanaman modal dalam negeri.

Daftar Pustaka

- Akbar, Deni Nurdin, (00313034) *Peranan Bantuan Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDB Indonesia*, Skripsi FE UII, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin (1999), *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan, STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Arya, W. Indra, (00313109) *Analisis Peranan Investasi PMDN dalam perekonomian Indonesia*, Skripsi FE UII, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (1985-2005), *DIY dalam Angka*, BPS, Yogyakarta.
- Bank Indonesia (2000-2005), *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*, berbagai edisi, Jakarta.
- _____, (1985-2005), *Laporan Tahunan Bank Indonesia*, berbagai edisi, Yogyakarta.
- Boediono (1985), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro (1991), *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Gujarati ,Damodar (2003), *Econometric*, Erlangga, Jakarta..
- Isyani, dan Maulidiyah Indra Hasmarini (2005), *Analisis Konsumsi di Indonesia Tahun 1989-2002 Tinjauan Terhadap Hipotesis Keynes dan Post Keynes*, JEP, Vol.6, No.3, UII, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad (1997), *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Madura (1999), *Pengantar Bisnis I*, Salemba Empat.
- Mankiw, Gregory N. (2003) *Macroeconomics* . Harvard University. New York: Worth Publishers.
- Nopirin (1987), *Ekonomi Internasional*, BPFE, UGM.
- Samuelsen, Paul A & William D. Nordhaus, (1994), *Makro Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah (1995) *Dasar-Dasar dan Tekhnik Manajemen Kredit*, Bina Aksara , Jakarta.

Sukirno, Sadono (1993), *Pengantar Teori Makroekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

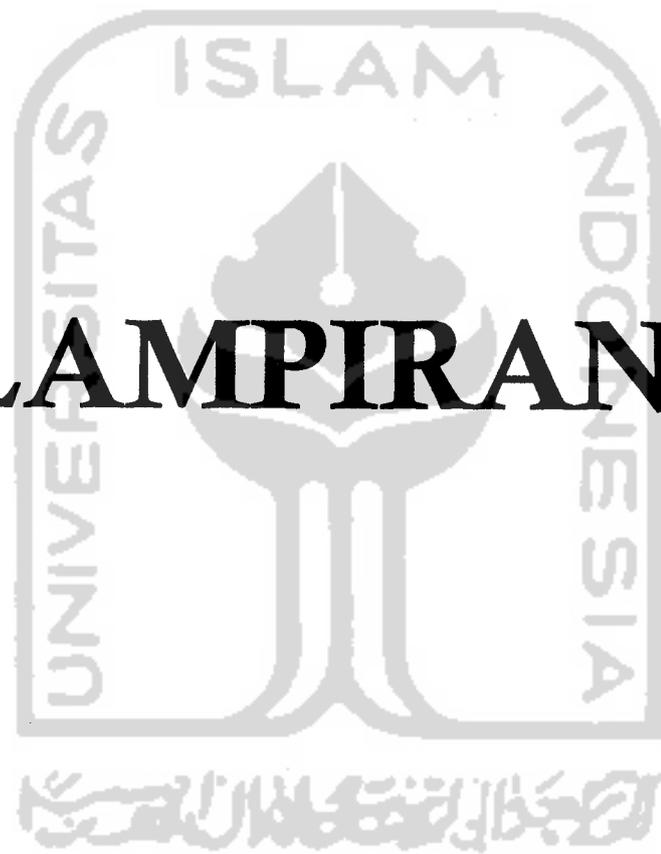
Teguh, Mulyono P (1990), *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE. Yogyakarta

Todaro, Michael.P. dan Stephen C. Smith (1993), *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.

Widarjono, Agus (2005), *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, FE UII, Yogyakarta.



LAMPIRAN



Data Perkembangan PMDN, PDRB, SBKI, Inflasi, dan Variabel Dummy masa sebelum dan sesudah krisis moneter di propinsi DI Yogyakarta.

Tahun	PMDN	PDRB	SBKI	INF	DM
1985	82253	6930046	14.57	8.76	0
1986	124177	7470269	14.24	4.31	0
1987	135087	7774144	16.99	8.83	0
1988	206896	8238398	16.16	8.90	0
1989	265723	8758936	16.20	4.43	0
1990	306905	9159241	20.59	5.21	0
1991	412033	9634857	21.25	10.73	0
1992	530697	10303121	15.69	8.38	0
1993	625431	10901831	15.50	4.78	0
1994	686307	11699390	12.99	10.01	0
1995	905693	12955802	11.82	8.55	0
1996	1064588	13958968	14.17	0.91	0
1997	1283716	14449327	14.54	12.72	1
1998	1299966	12833873	22.33	77.46	1
1999	1362201	12960802	18.17	2.51	1
2000	1815183	13480000	16.00	7.32	1
2001	1814240	14056000	12.97	12.56	1
2002	1961916	14689000	11.45	12.01	1
2003	2405967	15360000	11.33	5.36	1
2004	2401967	16149000	13.97	6.95	1
2005	2251067	16898000	15.48	14.98	1

Keterangan

- PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rupiah)
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)
SBKI : Suku Bunga Kredit Investasi (Persen)
INF : Inflasi (Persen)
DM : Dummy Variabel
0 : sebelum masa krisis moneter
1 : setelah masa krisis moneter

Uji MWD

Dependent Variable: LOG(PMDN)

Method: Least Squares

Date: 07/23/07 Time: 12:10

Sample: 1985 2005

Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	3.586567	0.252124	14.22541	0.0000
LOG(SBKI)	0.051549	0.280864	0.183539	0.8568
LOG(INF)	0.018695	0.057596	0.324591	0.7500
DM	0.285891	0.145752	-1.961489	0.0687
Z2	-2.78E-07	1.87E-07	-1.486770	0.1578
C	-45.11989	4.352053	-10.36749	0.0000
R-squared	0.978507	Mean dependent var		13.44324
Adjusted R-squared	0.971343	S.D. dependent var		1.060045
S.E. of regression	0.179450	Akaike info criterion		-0.362887
Sum squared resid	0.483033	Schwarz criterion		-0.064452
Log likelihood	9.810311	F-statistic		136.5799
Durbin-Watson stat	0.740594	Prob(F-statistic)		0.000000

Uji Regresi Linear

Dependent Variable: PMDN
 Method: Least Squares
 Date: 07/24/07 Time: 17:54
 Sample: 1985 2005
 Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	0.153101	0.025758	5.943878	0.0000
SBKI	-19859.48	18551.02	-1.070533	0.3003
INF	-2748.197	3516.651	-0.781481	0.4459
DM	688018.1	150909.9	4.559133	0.0003
C	-723356.3	448600.2	-1.612474	0.1264
R-squared	0.952459	Mean dependent var		1044858.
Adjusted R-squared	0.940573	S.D. dependent var		801352.0
S.E. of regression	195350.4	Akaike info criterion		27.40723
Sum squared resid	6.11E+11	Schwarz criterion		27.65593
Log likelihood	-282.7760	F-statistic		80.13717
Durbin-Watson stat	1.628814	Prob(F-statistic)		0.000000

Uji Regresi Log Linear

Dependent Variable: LOG(PMDN)
 Method: Least Squares
 Date: 07/24/07 Time: 17:56
 Sample: 1985 2005
 Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	3.601663	0.261275	13.78493	0.0000
LOG(SBKI)	0.274535	0.246286	1.114698	0.2814
LOG(INF)	-0.007872	0.056787	-0.138627	0.8915
DM	0.209164	0.141372	1.479527	0.1584
C	-45.91754	4.479253	-10.25116	0.0000
R-squared	0.975340	Mean dependent var		13.44324
Adjusted R-squared	0.969174	S.D. dependent var		1.060045
S.E. of regression	0.186114	Akaike info criterion		-0.320656
Sum squared resid	0.554216	Schwarz criterion		-0.071960
Log likelihood	8.366890	F-statistic		158.2033
Durbin-Watson stat	0.827020	Prob(F-statistic)		0.000000

Uji Multikolinearitas 1

Dependent Variable: LOG(PDRB)

Method: Least Squares

Date: 07/23/07 Time: 19:01

Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(SBKI)	-0.301122	0.216643	-1.389949	0.1825
LOG(INF)	-0.040393	0.051796	-0.779855	0.4462
DM	0.417779	0.083396	5.009556	0.0001
C	16.97730	0.578101	29.36736	0.0000
R-squared	0.657615	Mean dependent var		16.25323
Adjusted R-squared	0.597195	S.D. dependent var		0.272213
S.E. of regression	0.172765	Akaike info criterion		-0.504122
Sum squared resid	0.507414	Schwarz criterion		-0.305165
Log likelihood	9.293282	F-statistic		10.88392
Durbin-Watson stat	0.389388	Prob(F-statistic)		0.000316

Uji Multikolinearitas 2

Dependent Variable: LOG(SBKI)

Method: Least Squares

Date: 07/23/07 Time: 19:02

Sample: 1985 2005

Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	-0.338891	0.243815	-1.389949	0.1825
LOG(INF)	0.047868	0.054704	0.875040	0.3937
DM	0.058956	0.138483	0.425730	0.6756
C	8.111906	3.947978	2.054699	0.0556
R-squared	0.193383	Mean dependent var		2.726431
Adjusted R-squared	0.051039	S.D. dependent var		0.188144
S.E. of regression	0.183280	Akaike info criterion		-0.385960
Sum squared resid	0.571057	Schwarz criterion		-0.187003
Log likelihood	8.052581	F-statistic		1.358562
Durbin-Watson stat	0.977134	Prob(F-statistic)		0.289000

Uji Multikolinearitas 3

Dependent Variable: LOG(INF)

Method: Least Squares

Date: 07/23/07 Time: 19:02

Sample: 1985 2005

Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	-0.855078	1.096459	-0.779855	0.4462
LOG(SBKI)	0.900384	1.028963	0.875040	0.3937
DM	0.954063	0.557699	1.710714	0.1053
C	13.06727	18.86641	0.692621	0.4979
R-squared	0.215776	Mean dependent var		2.033208
Adjusted R-squared	0.077383	S.D. dependent var		0.827552
S.E. of regression	0.794888	Akaike info criterion		2.548412
Sum squared resid	10.74140	Schwarz criterion		2.747369
Log likelihood	-22.75833	F-statistic		1.559155
Durbin-Watson stat	2.477309	Prob(F-statistic)		0.235880

Uji Multikolinearitas 4

Dependent Variable: DM

Method: Least Squares

Date: 07/23/07 Time: 19:03

Sample: 1985 2005

Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB)	1.426969	0.284849	5.009556	0.0001
LOG(SBKI)	0.178930	0.420289	0.425730	0.6756
LOG(INF)	0.153938	0.089985	1.710714	0.1053
C	-23.56511	5.136756	-4.587547	0.0003
R-squared	0.663004	Mean dependent var		0.428571
Adjusted R-squared	0.603534	S.D. dependent var		0.507093
S.E. of regression	0.319294	Akaike info criterion		0.724233
Sum squared resid	1.733124	Schwarz criterion		0.923189
Log likelihood	-3.604444	F-statistic		11.14855
Durbin-Watson stat	0.538413	Prob(F-statistic)		0.000277

Uji White

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	2.466822	Probability	0.075866
Obs*R-squared	11.98050	Probability	0.101202

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/23/07 Time: 19:56

Sample: 1985 2005

Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.94885	31.75096	1.447164	0.1715
LOG(PDRB)	-6.176192	3.900783	-1.583321	0.1374
(LOG(PDRB))^2	0.193128	0.120980	1.596360	0.1344
LOG(SBKI)	2.445775	0.914341	2.674904	0.0191
(LOG(SBKI))^2	-0.437216	0.167131	-2.616012	0.0213
LOG(INF)	0.020410	0.020327	1.004078	0.3337
(LOG(INF))^2	-0.002178	0.004789	-0.454725	0.6568
DM	-0.013227	0.022874	-0.578257	0.5730
R-squared	0.570500	Mean dependent var		0.026391
Adjusted R-squared	0.339231	S.D. dependent var		0.031967
S.E. of regression	0.025985	Akaike info criterion		-4.180269
Sum squared resid	0.008778	Schwarz criterion		-3.782355
Log likelihood	51.89282	F-statistic		2.466822
Durbin-Watson stat	2.372118	Prob(F-statistic)		0.075866